# PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1968-1992: SUATU KAJIAN SEJARAH PEREKONOMIAN

**SKRIPSI**

**Untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :**

**ERNAWATI**

**3150406011**

**ILMU SEJARAH**

**JURUSAN SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
| --- | --- |
| Drs. Karyono, M. Hum | Dr. Cahyo Budi Utomo, M. Pd |
| NIP. 19510606 198003 1 003 | NIP. 19611121 198601 1 001 |

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah UNNES

Arif Purnomo, S. Pd., S.S., M. Pd

NIP. 19730131 199903 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Dra. Santi Muji Utami, M. Hum
NIP. 19650524 199002 2 001

Penguji I

Drs. Karyono, M. Hum
NIP.19510606 198003 1 003

Penguji II

Dr. Cahyo Budi Utomo, M. Pd
NIP. 19611121 198601 1 001

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Subagyo, M. Pd
NIP. 19510808 198003 1 003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi atau tugas akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Ernawati
NIM. 3150406011

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

"Tidak sedikit keberhasilan diraih setelah melalui beberapa kegagalan. Jangan pernah menyerah menghadapi kegagalan, ambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan tetap semangat untuk meraih sebuah keberhasilan".

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
2. Kakakku, Wahyu Riyanto, Herlina Puspitarini dan keponakanku Daffa dan Thalita.
3. Teman-teman kos dan Jurusan Sejarah angkatan 2006.
4. Suamiku tercinta, Dwi Hadi Setiawan.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat-Nya dan berkat bimbingan dosen pembimbing, sehingga skripsi dengan judul "Penanggulangan Kemiskinan melalui Swasembada Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992: Suatu Kajian Sejarah Perekonomian" dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Keberhasilan penyelesaian penelitian sampai dengan tersusunnya skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati disampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengantar ijin penelitian.
3. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd, Ketua Jurusan Sejarah yang telah membantu kelancaran ujian skripsi penulis.
4. Dra. Santi Muji Utami, M.Hum, selaku Penguji utama atas pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Karyono, M.Hum, selaku Pembimbing I atas bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd, selaku Pembimbing II atas bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sejarah atas bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama bangku kuliah.
8. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kab. Grobogan atas ijinnya untuk melakukan pengambilan data.
9. Seluruh staf Dinas Pertanian Kab. Grobogan yang telah memberikan informasi dan membantu dalam pengambilan data.
10. Seluruh staf Badan Pusat Statistik Kab. Grobogan yang telah memberikan informasi dan membantu dalam pengambilan data.
11. Bapak dan Ibu serta keluargaku tercinta yang telah memberi dorongan dan bantuan baik materiil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Suamiku tercinta yang tanpa lelah terus memberikan motivasi dan semangat.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sejarah angkatan 2006.
14. Teman-teman kos, atas bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

Penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, Juli 2013

Penulis

Ernawati
NIM. 3150406011

# SARI

**Ernawati**. 2013. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Swasembada Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992: Suatu Kajian Sejarah Perekonomian*. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

**Kata Kunci : Kemiskinan, pertanian, Repelita, swasembada**

Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang kondisi perekonomian masyarakatnya dalam taraf kemiskinan. Hal ini karena banyak lahan pertanian yang tidak terurus akibat perang, sehingga mengakibatkan lahan yang sudah ada menjadi kering dan tandus. Padahal sebagaimana diketahui, masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Memasuki era orde baru, pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan program Repelita yang salah satu programnya adalah swasembada pangan, yang diharapkan dapat menangulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah Kabupaten Grobogan tahun 1968-1992? (2) bagaimanakah kondisi perekonomian di Kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992? (3) bagaimanakah cara penanggulangan kemiskinan melalui swasembada pangan di Kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiogafi. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Grobogan, sedangkan lingkup temporal penulis mengambil tahun 1968-1992 karena pada tahun tersebut dimulai era orde baru yaitu pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto, dalam hal ini Presiden Soeharto mengadakan program-program untuk memajukan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya program Repelita atau pembangunan lima tahun dan Presiden Soeharto yakin bahwa dengan adanya program tersebut maka diharapkan rakyat akan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Repelita melalui usaha pencapaian swasembada pangan sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten grobogan. Pendapatan petani dan perluasan lapangan kerja terbuka sangat luas seiring dengan perkembangan peningkatan produksi pertanian yang diusahakan lewat program intensifikasi, perluasan areal, rehabilitasi, serta usaha pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian. Dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, pembangunan diarahkan pada usaha yang bersifat padat karya. Program padat karya tersebut dilaksanakan di daerah Gabus, Pulokulon, Kradenan, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Geyer dan Toroh. Saran yang dapat penulis berikan adalah usaha pencapaian swasembada pangan harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi karena program pemerintah tersebut sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

## DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iii

PERNYATAAN ..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

SARI ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR GAMBAR ..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 7

E. Ruang Lingkup Penelitian ..... 7

F. Tinjauan Pustaka ..... 8

G. Metode Penelitian ..... 10

H. Sistematika Penulisan ..... 17

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

A. Letak Geografis Kabupaten Grobogan ..... 19

B. Penduduk Kabupaten Grobogan ..... 21

C. Sejarah Kabupaten Grobogan ..... 40

BAB III KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT PETANI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1968-1992

A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan ..... 47

B. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Grobogan . 59

BAB IV PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN GROBOGAN

A. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan di Kabupaten Grobogan 73

B. Dampak Usaha Pencapaian Swasembada Pangan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan ..... 104

BAB V Penutup

A. Simpulan ..... 115

B. Saran ..... 117

DAFTAR PUSTAKA ..... 118

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL


Tabel Halaman

2.1 Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Grobogan ..... 21

2.2 Jumlah Penduduk dan Perkembangan pertahun di Kabupaten Dati II Grobogan Tahun 1969-1992 ..... 22

2.3 Kepadatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk per Kecamatan/ Desa di Kabupaten Grobogan ..... 24

2.4 Mata Pencaharian Penduduk dan Persentase di Kabupaten Grobogan 25

3.1 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita I 55

3.2 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita II 56

3.3 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita III 57

3.4 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita IV 57

3.5 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita V 58

3.6 Mata Pencaharian Penduduk dan Persentase di Kabupaten Grobogan 59

3.7 Mata Pencaharian Penduduk Kedungjati ..... 60

3.8 Mata Pencaharian Penduduk Karangrayung ..... 60

3.9 Mata Pencaharian Penduduk Penawangan ..... 61

3.10 Mata Pencaharian Penduduk Toroh ..... 62

3.11 Mata Pencaharian Penduduk Geyer ..... 62

3.12 Mata Pencaharian Penduduk Pulokulon ..... 63

3.13 Mata Pencaharian Penduduk Kradenan ..... 64

3.14 Mata Pencaharian Penduduk Gabus ..... 64

3.15 Mata Pencaharian Penduduk Ngaringan ..... 65

3.16 Mata Pencaharian Penduduk Wirosari ..... 66

3.17 Mata Pencaharian Penduduk Tawangharjo ..... 66

3.18 Mata Pencaharian Penduduk Grobogan ..... 67

3.19 Mata Pencaharian Penduduk Purwodadi ..... 68

3.20 Mata Pencaharian Penduduk Brati ..... 68

3.21 Mata Pencaharian Penduduk Klambu ..... 69

3.22 Mata Pencaharian Penduduk Godong ..... 70

3.23 Mata Pencaharian Penduduk Gubug ..... 70

3.24 Mata Pencaharian Penduduk Tegowanu ..... 71

3.25 Mata Pencaharian Penduduk Tanggungharjo ..... 72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

PETA KABUPATEN GROBOGAN ..... 28

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Instrumen penelitian skripsi
2. Sumber informan
3. Surat pengantar ijin penelitian dari DEKAN FIS
4. Surat ijin dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat
5. Foto rumah masyarakat miskin dan masyarakat yang sudah mulai berkembang

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Basri Faisal, 2002:98-99).

Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan serangkaian aktivitas perubahan dan perbaikan di dalam masyarakat yang mengalami masalah sosial tersebut perlu dipahami berbagai hal yang berkaitan dengan seluk beluk permasalahannya (Soetomo, 2008:307-308).

Pengertian kemiskinan dalam konsep ekonomi yaitu kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Sementara menurut ilmuwan konsep-konsep tersebut dikaitkan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang lain (Soetomo, 2008:308-309).

Perlu diketahui bahwa pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal. Faktor-faktor internal di antaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Faktor internal dan eksternal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dua hal tersebut merupakan masalah besar di banyak negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia (Tambunan, 2001:17).

Pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang penting di antaranya adalah pendudukan Jepang, Perang Dunia II, perang revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Pada tahun 1949-1956 pemerintahan di Indonesia menerapkan suatu sistem politik yang disebut

demokrasi liberal. Selain itu terjadi transisi ke sistem politik yang disebut "*demokrasi terpimpin*", yang berlangsung dari tahun 1957-1965. akan tetapi dengan adanya sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia pada masa ini mengalami masalah perekonomian, termasuk di Kabupaten Grobogan. Masalah pertama yang sangat mendesak untuk segera ditangani di Kabupaten Grobogan yaitu keadaan ekonomi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui masyarakat Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Dengan demikian penanganan terhadap keadaan lahan pertanian dan sarana penunjangnya perlu segera dilaksanakan. Pada awal tahun 1968 masih banyak lahan pertanian di wilayah ini menjadi tidak terurus, sehingga mengakibatkan lahan yang sudah ada menjadi kering dan tandus, serta jaringan saluran air disawah-sawah tidak berfungsi lagi.

Adanya kerusakan di lahan pertanian ini semakin memprihatinkan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang kering dan tandus. Wilayah ini menurut tingkat kesuburan tanahnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu wilayah sebelah barat Kali Serang dan wilayah sebelah timur Kali Serang. Daerah yang berada dibagian barat Kali Serang merupakan daerah yang subur, dan penghasil padi yang paling utama di wilayah Grobogan. Sedangkan daerah sebelah timur Kali Serang merupakan daerah kurang subur, karena toponominya yang terdiri dari pegunungan Kendeng, sehingga hasil utamanya hanyalah berupa tanaman "*polowijo*". Hanya ironisnya di daerah yang kurang subur tersebut jika musim hujan datang sering mendapatkan bahaya serangan banjir, sehingga

kemungkinan untuk meningkatkan produksi padi menjadi terhambat. Akibat yang mengancam dari kondisi pertanian semacam ini adalah musim paceklik panjang jika musim kemarau datang, sehingga di desa-desa muncul wabah busung lapar. Penderitaan seperti ini pada tahun-tahun awal kemerdekaan dapat dikatakan sudah menyatu dengan masyarakat pedesaan Kabupaten Grobogan (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1995:53).

Masalah lain yang erat hubungannya dengan jaringan ekonomi rakyat, dan perlu mendapatkan penanganan adalah masalah komunikasi dan transportasi. Dalam masalah komunikasi pada tahun 1950-an di wilayah kabupaten Grobogan belum berkembang media komunikasi elektronika. Pemilik radio hingga tahun 1960-an ibaratnya masih dapat dihitung dengan jari. Agar komunikasi dapat berjalan, maka pengembangan komunikasi tatap muka dan surat menyurat perlu dilaksanakan. Oleh karena sifat komunikasi tersebut membutuhkan prasarana dan sarana transportasi, maka masalah ini juga perlu mendapatkan pemecahan.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang demikian ini membawa akibat yang tidak menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tidak lancarnya arus ekonomi akibat tiadanya jaringan transportasi sangat dirasakan oleh masyarakat Purwodadi, tidak saja yang tinggal di desa-desa melainkan juga yang tinggal di kota. Pada masa panen, khususnya panen "*polowijo*", penduduk desa tidak dapat membawa hasil buminya ke pasar dengan lancar, sehingga menjadi menumpuk di desa. Kalaupun mereka memaksakan diri membawanya ke kota, terpaksa dengan cara memikul atau menggendongnya dan menempuh perjalanan yang panjang. Sebaliknya penduduk desa merasa susah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: garam, minyak goreng,

minyak tanah, dan sebagainya (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan,1995: 53-54).

Sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas bidang ekonomi (Tambunan, 2001: 21).

Program repelita yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia juga mencakup di wilayah Kabupaten Grobogan. Sejak Pelita I, pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Grobogan dititikberatkan pada sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian tersebut berlanjut sampai Pelita IV. Selama Pelita II produksi padi mengalami pasang surut, karena keadaan alam yang kurang menguntungkan seperti adanya bencana alam banjir dan hama, sehingga tidak terlalu terdapat peningkatan produksi padi setiap tahunnya sampai pada Pelita III. Selama Pelita IV dan rencana Pelita V, Pemerintahan Dati II Grobogan telah meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dengan meningkatkan sarana / prasarana produksi. Peningkatan tersebut melalui usaha ekstensifikasi,

intensifikasi, diversivikasi dan rehabilitasi dengan secara terpadu serta tetap memelihara kelestarian, sumber dasar alam dan lingkungan hidup. Demikian juga usaha memantapkan kelembagaan pertanian telah ditempuh oleh Pemda Dati II Grobogan dalam usaha pertanian (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1995: 65-67) .

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1968-1992: SUATU KAJIAN SEJARAH PEREKONOMIAN"**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sejarah Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah kondisi perekonomian di Kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992?
3. Bagaimanakah cara penanggulangan kemiskinan melalui swasembada pangan di Kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui Kondisi Perekonomian di Kabupaten Grobogan pada Tahun 1968-1992.
3. Untuk mengetahui cara penanggulangan kemiskinan melalui swasembada pangan di Kabupaten Grobogan pada Tahun 1968-1992.

## D. Manfaat Penelitian

a. Menambah wawasan baru tentang sejarah lokal bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan data dalam penulisan sejarah.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal. Ruang lingkup spasial adalah batasan-batasan wilayah atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan di pilih dikarenakan di Kabupaten Grobogan banyak masyarakat miskin dan kekurangan bahan makanan.

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini mengambil tahun 1968-1992 karena pada tahun tersebut dimulai era orde baru yaitu pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto, dalam hal ini Presiden Soeharto mengadakan program-program untuk memajukan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya program Repelita atau pembangunan lima tahun dan Presiden Soeharto yakin bahwa dengan adanya program tersebut maka diharapkan rakyat akan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan.

## F. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang beracuan pada sumber-sumber yang didapatkan. Selain itu juga memakai kajian pustaka yaitu untuk membantu analisis penulisan skripsi. Buku yang dijadikan acuan sebagai dasar keilmiahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya: Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan (1991/1992) berisi tentang awal terbentuknya Kabupaten Grobogan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Grobogan. Dimana keadaan ekonomi masyarakat Grobogan khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya sangat memprihatinkan. Sebagaimana diketahui masyarakat Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Sedangkan di bidang sosial nampak bahwa akibat tidak lancarnya transportasi, sangat menyulitkan mobilitas para pelajar, pegawai, pedagang, dan buruh, serta aktifitas mereka menjadi terhambat.

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke IV Kabupaten Grobogan (1990) berisi tentang masalah-masalah pokok yang dialami kabupaten Grobogan antara lain yaitu dalam bidang kependudukan, keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, pendidikan, pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah serta laju pertumbuhan antar daerah. Serta berisi tentang pemecahan masalah-masalah pokok tersebut.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Ringkasan (Buku I) karya H. T Soewito (1999) yang berisi tentang keadaan demografi di kabupaten Grobogan, keadaan demografi sosial, kegiatan ekonomi, sumber pencemaran, dan sumber daya alam kabupaten Grobogan.

Menurut Suparlan (1993:4) kemiskinan merupakan taraf hidup manusia yang berada pada kondisi serba kekurangan. Menurut pendapat Rosyidi (1996:20) bahwa kemiskinan adalah sebuah konsep yang relative sehingga sulit didefinisikan. Ditambahkan oleh Rosyidi (1996:23) kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu kemiskinan mutlak yaitu kemiskinan yang didasarkan pendapat seseorang yang berada di bawah kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang membandingkan tingkat kehidupan seseorang atau kelompok dengan kelompok lain.

Nasikun (1996:112) berpendapat bahwa ciri-ciri kemiskinan adalah kurangnya atau tidak layaknya cara dan kebiasaan makan, minimnya tingkat pendidikan dan anggapan keluarga bahwa kemiskinan sebagai suatu keniscayaan (kemiskinan merupakan keadaan yang sulit untuk diubah). Kemiskinan dapat diukur berdasarkan cara konsumsi makanan, berdasarkan tingkat pendidikan dan harapan untuk bertahan hidup (Darmawan, 1998:25).

Kaum marxist mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat diukur dari skala kebutuhan-kebutuhan material manusia yang terbatas. Kaum liberal mengukur tingkat kemiskinan dari segi konsumsi, keinginan-keinginan orang miskin dibatasi oleh garis kemiskinan, apabila garis ini tidak dapat dilewati maka dia tergolong masyarakat miskin (Andre, 1996:139). Soetomo (1995:116) berpendapat bahwa ukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan, indikator kesejahteraan dan pengukuran ketimpangan diantara masyarakat.

Nurhadi (2007:21) berpendapat bahwa ukuran dalam menentukan garis kemiskinan masyarakat terbagi menjadi empat yaitu: Pendekatan kebutuhan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makan, seseorang atau suatu kelompok dikatakan miskin apabila tidak mampu untuk memenuhi minimum untuk makan. Pendekatan nilai gizi minimum masyarakat dikatakan miskin apabila pemenuhan akan protein dan kalori tidak mencukupi. Pendekatan kebutuhan dasar manusia, sedangkan kebutuhan pokok manusia terbagi dua yaitu kebutuhan pangan dan kelompok kebutuhan bukan pangan (sandang, perumahan, sekolah, perawatan dan obat-obatan). Pendekatan garis kemiskinan internasional dibagi tiga metode yaitu metode harapan hidup usia satu tahun, angka kematian bayi per seribu kelahiran dan angka melek huruf dari total penduduk diatas usia 7 tahun.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Pengertian metode sejarah disini adalah suatu proses sejarah mengacu dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah (Gottschalk 1975:32). Sedangkan menurut Garraghan dalam Wasino (2007:8) metode sejarah atau penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara

kritis, dan menyajikan suatu hasil sinthese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) hasil-hasil yang dicapai.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan ekonomi dalam mengkaji Penanggulangan Kemiskinan Melalui Swasembada Pangan pada jaman orde baru. Pendekatan sosiologi sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan sosial yang menyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti adat-istiadat, agama, norma-norma, struktur masyarakat, mata pencaharian. Hal ini untuk memudahkan dalam menguraikan mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan pada masa orde baru. Selain itu untuk dapat menjabarkan perihal konflik dalam hubungannya antara buruh tani dan tuan tanah.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanggulangan kemiskinan pada masa orde baru. Sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat menjelaskan mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan.

Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data atau Heuristik

   Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang berupa keterangan-keterangan, kejadian, benda peninggalan masa lampau dan bahan tulisan (Gottschalk, 1975: 35).

   Pengumpulan data dalam studi ini didapatkan melalui metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalian sumber-sumber

sejarah yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Kedua sumber tersebut dapat dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Dalam penelitian sumber primer yang digunakan penulis, seperti arsip, foto, dsb.
b. Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Dalam penelitian sumber sekunder menggunakan studi pustaka, seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya (Gottschalk, 1975: 35).

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk tujuan tertentu dan tugas tertentu pula, dan mencoba mendapatkan keterangan (pendirian) secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain, ini berguna untuk mendapatkan sumber lisan dari orang yang berperan sebagai pelaku peristiwa itu. Jadi dalam penelitian ini akan dijumpai keterangan lisan dari beberapa orang informan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, yaitu arsip-arsip yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Dokumen yang didapatkan nantinya akan diolah dan dianalisis terlebih dahulu untuk dapat dijadikan sumber dalam penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses mencari informasi, menelaah dan penghimpunan data sejarah yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Gottschalk, 1975: 46). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data berupa buku dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pusat UNNES, Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, serta Perpustakaan Kabupaten Grobogan.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata. Langkah kedua ini adalah langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan

tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik Intern (Wasino, 2007: 9).

a. Kritik Ekstern

Merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut dan bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keaslian sumber yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kritik intern. Ada tiga pertanyaan yang penting untuk dapat diajukan dalam proses kritik ekstern yaitu, adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?, adakah sumber itu asli atau turunan?, adakah sumber itu utuh atau telah diubah (Wasino 2007:51). Sumber-sumber ataupun dokumen yang diperoleh kemudian diuji keasliannya, untuk selanjutnya dapat diuji kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk penelitian sejarah. Peneliti menggunakan kritik ekstern untuk mengetahui tingkat kredibilitas dari sumber primer maupun dari sumber sekunder. Dalam menentukan otensitas (keaslian) sumber yang berupa buku-buku, dokumen dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan swasembada pangan di Kabupaten Grobogan pada masa orde baru.

b. Kritik Intern

Merupakan penilaian sumber dari segi isi yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran sumber. Mengetahui kebenaran sumber harus memperhatikan bagaimana nilai pembuktian yang sebenarnya dari isinya dan menetapkan keakuratan dan dapat dipercaya dari sumber itu. Sedangkan untuk menguji kebenaran isi dokumen dapat memperhatikan

dalam mengidentifikasi pengarang, konsep dan teori yang dipakai, situasi politik pada waktu itu, dan latar belakang sosial budaya si penulis. Untuk menguji kebenaran sumber maka diperlukan:

1) Penilaian Intrinsik

Penilaian intrinsik terhadap sumber untuk menentukan sifat informasi yang diberikan dengan menyoroti terhadap posisi pembuat sumber baik lisan maupun sumber tertulis. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pengarang seperti adakah ia mampu untuk memberikan kesaksian, berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Adakah narasumber mau memberikan kesaksian yang benar menyangkut kepentingan si penggarang terhadap peristiwa sejarah, apakah ia menutupi atau melebih-lebihkan suatu peristiwa sejarah.

2) Membandingkan kesaksian berbagai sumber dengan menjejerkan dari saksi-saksi yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah saksi tersebut mempunyai keberanian untuk dapat menyatakan kebenaran dari suatu sumber maupun peristiwa (Wasino 2007:55).

3. Penafsiran Data atau Interpretasi

Penafsiran data atau interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah, yang menguraikan fakta sejarah dengan menggunakan pendekatan. Tahapan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedang sintesa

adalah menyatukan keduanya. Untuk menafsirkan fakta-fakta ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: 1) diseleksi, 2) disusun, 3) diberikan tekanan, 4) ditempatkan dalam urutan kasual (Gottschalk, 1975: 20). Atau proses menyusun, merangkai antar satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya.

Abdurrahman (1999) membagi interpretasi menjadi 2, yakni:

a) Interpretasi Monistik, yakni interpretasi yang bersifat tunggal atau suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar atau perbuatan orang terkemuka.
b) Interpretasi Pluralistik yang meyakini bahwa sejarah akan mengikuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang multikompleks.

Dalam proses interpretasi, tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun.

4. Penyajian Data atau Historiografi

Historiografi adalah menyampaikan sintesa dalam bentuk suatu kisah yang disusun secara kronologis dengan tema yang jelas dan mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab-bab atau bagian yang dapat mengatur atau membangun urutan kronologis dan sistematis.

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. Historiografi merupakan langkah untuk menyampaikan atau menyajikan

sintesa yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan. Rekonstruksi yang imajinatif dari pada data yang diperoleh tersebut, kebenaran datanya diharapkan bersifat objektif dalam arti maknanya berupa cerita sejarah kritis (Gottschalk, 1975: 32). Dalam melakukan rekonstruksi imajinatif peneliti dengan segala kemampuannya berusaha mengarang atau membuat susunan cerita yang menarik dengan menyajikan fakta-fakta yang kering dalam bentuk cerita yang menggugah pembaca.

Penulisan atau penyusunan cerita sejarah memerlukan kemampuan untuk menjaga standar mutu cerita sejarah yaitu dengan prinsip-prinsip realisasinya, yang mana memerlukan prinsip kronologi (urut-urutan waktu), prinsip kausasi (hubungan sebab-akibat) dan mungkin pula kemampuan untuk berimajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman). Interpretasi tersebut disajikan dalam bentuk karya sejarah yang disusun secara kronologis, yaitu tentang penanggulangan kemiskinan melalui swasembada pangan pada masa orde baru.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan Kemiskinan Melalui Swasembada Pangan Di Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992: Suatu Kajian Sejarah Perekonomian, ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, Bab ini berisi:latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kabupaten Grobogan, bab ini berisi tentang letak geografis kabupaten Grobogan, penduduk kabupaten Grobogan, dan sejarah kabupaten Grobogan.

Bab III Kondisi Perekonomian Masyarakat Petani Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992, bab ini berisi tentang mata pencaharian penduduk masyarakat Grobogan, dan kondisi pertanian kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992.

Bab IV Penanggulangan Kemiskinan Melalui Swasembada Pangan Di Kabupaten Grobogan Tahun 1968-1992, bab ini berisi tentang usaha pencapaian swasembada pangan di kabupaten Grobogan serta dampak usaha pencapaian swasembada pangan terhadap penanggulangan kemiskinan di kabupaten Grobogan.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian atau penulisan skripsi.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

## A. Letak Geografis Kabupaten Grobogan

Secara geografis wilayah Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Letak geografis wilayah adalah 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30’ LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km. Sedangkan batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi (Jatim). Serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak.

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang pusat pemerintahannya berada di Purwodadi. Secara geografis, Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng dibagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua pegunungan tersebut merupakan sumber dari hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan disamping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Daerah ini merupakan daerah dengan bentuk tanah yang bergelombang. Kondisi

geografis Kabupaten Grobogan cocok untuk pertanian seperti padi dan polowijo. Beberapa sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Karena potensi aliran Sungai-Sungai Tuntang, Serang, dan Lusi dengan beberapa anak sungainya mampu mengairi tanah-tanah persawahan di Grobogan. Di samping itu untuk tandon air, dibangunlah bendungan seperti Bendung Sedadi, Bendung Kali Lanang, Sidorejo, Dumpil, dan Bendung Klambu, serta Waduk Kedung Ombo, Waduk Nglangon, dan Waduk Sanggah.

Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk juga aliran banyak sungai, jalan raya dan jalan kereta api.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan terletak pada permukaan yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%, daerah berbukit dan pegunungan terletak di bagian utara dan selatan, tepatnya di sekitar jalur Pegunungan Kendeng Utara dan Selatan. Secara umum kondisi topografi yang ada dapat dikelompokkan menjadi menjadi 3 kelompok :

1. Daerah dataran, berada pada ketinggian sampai dengan 50 mdpl, dengan kelerengan 0 - 8%
2. Daerah perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 -100 mdpl, dengan kelerengan 8 - 15%
3. Daerah dataran tinggi, berada pada ketinggian antara 100 - 500 mdpl, dengan kelerengan >15%

Secara administratif Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 6 wilayah pembantu Bupati, 19 Kecamatan. Terdiri dari 273 Desa dan 7 Kelurahan; 1.461 Dusun; dan 1551 RW serta 7.269 Rt. Luas wilayah 197.586.420 Ha atau kurang lebih 6,07% dari luas Propinsi Dati II Jawa Tengah.

Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1. Nama-Nama Kecamatan Di Kabupaten Grobogan**

| No | Kecamatan | No | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kedungjati | 11. | Tawangharjo |
| 2. | Karangrayung | 12. | Grobogan |
| 3. | Penawangan | 13. | Purwodadi |
| 4. | Toroh | 14. | Brati |
| 5. | Geyer | 15. | Klambu |
| 6. | Pulokulon | 16. | Godong |
| 7. | Kradenan | 17. | Gubug |
| 8. | Gabus | 18. | Tegowanu |
| 9. | Ngaringan | 19. | Tanggungharjo |
| 10. | Wirosari | | |

*Sumber :Badan Pusat Statistik (Kabupaten Grobogan dalam angka 1992).*

## B. Penduduk Kabupaten Grobogan

1. Perkembangan Penduduk

   a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi sekaligus sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk sebagai potensi sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang lain yang menghasilkan produksi. Oleh sebab itu masalah penduduk harus dipecahkan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Perkembangan penduduk Kabupaten Grobogan seperti terjadi selama Pelita IV menunjukkan rata-rata mencapai 1,50% per tahun. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan selama Pelita III yang pertumbuhan rata-ratanya 1,52 persen. Pada Pelita II penduduk daerah Kabupaten Dati II Grobogan tumbuh rata-rata 1,56 persen dimana pada tahun 1980 sebesar 1.020.231 orang dan tahun 1984 sebanyak 1.083.739 orang, maka tahun 1984-1987 Pelita IV rata-rata pertumbuhan mencapai 1,50 persen pertahun.

Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Dati II Grobogan dalam seri waktu tahun 1969-1992 nampak sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan perkembangan pertahun di Kabupaten Dati II Grobogan tahun 1969-1992.**

| Tahun | Jumlah (orang) | Perkembangan per tahun (%) | Indeks Perkembangan |
|---|---|---|---|
| 1969 | 838.472 | - | 100 |
| 1970 | 862.320 | 2,84 | 102,84 |
| 1971 | 878.865 | 1,91 | 104,75 |
| 1972 | 894.404 | 1,77 | 106,52 |
| 1973 | 910.187 | 1,76 | 108,28 |
| 1974 | 925.147 | 1,64 | 109,92 |
| 1975 | 943.762 | 2,01 | 111,93 |
| 1976 | 960.350 | 1,76 | 113,69 |
| 1977 | 971.365 | 1,15 | 114,84 |
| 1978 | 989.346 | 1,85 | 116,69 |
| 1979 | 1.004.204 | 1,50 | 118,19 |
| 1980 | 1.020.231 | 1,60 | 119,79 |
| 1981 | 1.038.432 | 1,78 | 121,57 |
| 1982 | 1.054.693 | 1,57 | 123,14 |
| 1983 | 1.067.419 | 1,21 | 124,35 |
| 1984 | 1.083.739 | 1,53 | 125,88 |
| 1985 | 1.103.062 | 1,78 | 127,66 |
| 1986 | 1.117.160 | 1,27 | 128,93 |
| 1987 | 1.132.958 | 1,42 | 130,35 |
| 1988 | 1.146.527 | 1,19 | 131,54 |
| 1989 | 1.161.477 | 1,30 | 132,84 |
| 1990 | 1.176.498 | 1,29 | 134,13 |
| 1991 | 1.189.279 | 1,08 | 135,21 |
| 1992 | 1.202.342 | 1,09 | 136,30 |

*Sumber: Buku Repelita tahun kalima Daerah Kabupaten Tingkat II Grobogan (Buku I)*

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 1969-1992 perkembangan penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan adalah 31,54 persen atau rata-rata pertahun bertambah 1,58 persen.

b. Tingkat Kepadatan Penduduk

Dalam masalah kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan nampak dipengaruhi oleh keadaan fasilitas atau sarana / prasarana yang telah tersedia serta tingkat kesuburan lahan usahanya.

Di daerah-daerah kecamatan yang sarana atau prasarana sudah cukup memadai (pasar, listrik, jalan, jembatan, sekolahan dan sebagainya lebih banyak dibanding daerah-daerah kecamatan lainnya misalnya Pulokulon dan Toroh). Dengan jumlah penduduk 1.067.419 pada tahun 1983 dijumpai kepadatan per $km^2$ dan pada tahun 1987 jumlah penduduk 1.137.938 kepadatannya mencapai 573 per $km^2$.

Berkaitan dengan kepadatan penduduk terlihat bahwa sampai Pelita IV kepadatan masih rendah, tetapi tentang penyebaran penduduk yang kelihatan kurang merata. Oleh karena itu dalam usaha pemerintah untuk lebih meratakan distribusi penduduk sesuai dengan daya dukung lahan maupun lingkungan maka sangat diperlukan suatu kebijaksanaan mengurangi daerah-daerah yang dianggap daya dukungnya sangat rendah terhadap penduduk melalui kebijaksanaan transmigrasi.

Adapun kepadatan dan rata-rata jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kepadatan Dan Rata-rata Jumlah Penduduk Per Kecamatan / Desa Di Kabupaten Grobogan**

| No | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 |
| 1 | Kedungjati | 295 | 341 | 350 | 378 | 303 |
| 2 | Karangrayung | 482 | 502 | 519 | 564 | 602 |
| 3 | Penawangan | 571 | 612 | 650 | 696 | 737 |
| 4 | Toroh | 620 | 698 | 756 | 811 | 848 |
| 5 | Geyer | 272 | 299 | 304 | 317 | 325 |
| 6 | Pulokulon | 506 | 581 | 608 | 661 | 695 |
| 7 | Kradenan | 512 | 545 | 575 | 626 | 660 |
| 8 | Gabus | 290 | 321 | 367 | 389 | 413 |
| 9 | Ngaringan | 401 | 412 | 422 | 454 | 482 |
| 10 | Wirosari | 378 | 395 | 441 | 474 | 499 |
| 11 | Tawangharjo | 415 | 455 | 492 | 527 | 555 |
| 12 | Grobogan | 410 | 460 | 500 | 544 | 560 |
| 13 | Purwodadi | 1102 | 1190 | 1218 | 1306 | 1364 |
| 14 | Brati | 540 | 582 | 624 | 678 | 707 |
| 15 | Klambu | 420 | 507 | 547 | 579 | 623 |
| 16 | Godong | 632 | 718 | 769 | 805 | 846 |
| 17 | Gubug | 700 | 749 | 797 | 865 | 906 |
| 18 | Tegowanu | 670 | 698 | 723 | 783 | 831 |

*Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 1973-1992 kepadatan penduduk di kabupaten Grobogan yang paling tinggi adalah kecamatan Purwodadi, dengan rata-rata dari lima tahun diatas berjumlah 1.236, sedangkan yang paling rendah adalah di kecamatan Kedungjati, dengan rata-rata dari lima tahun diatas berjumlah 333,4.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencarian penduduk di Kabupaten Grobogan didomonasi oleh petani. Untuk lebih jelasnya, persebaran dan persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk dan Persentase di Kabupaten Grobogan**.

| No | Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| 1. | Petani | 297462 | 309814 | 306145 | 348629 | 337999 | 50,25 |
| 2. | Buruh tani | 169573 | 161258 | 163783 | 156343 | 156294 | 25,35 |
| 3. | Pengusaha | 2191 | 2573 | 2824 | 4674 | 4290 | 0,52 |
| 4. | Buruh industri | 4614 | 6744 | 8812 | 12779 | 13794 | 1,47 |
| 5. | Buruh bangunan | 13352 | 15390 | 17269 | 27487 | 34189 | 3,38 |
| 6. | Pedagang | 6530 | 7245 | 8091 | 13487 | 17425 | 1,66 |
| 7. | Angkutan | 2074 | 2638 | 3061 | 5330 | 5544 | 0,59 |
| 8. | Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 11461 | 12792 | 15010 | 16741 | 18217 | 2,33 |
| 9. | Pensiunan | 4026 | 4273 | 4544 | 5308 | 5478 | 0,74 |
| 10. | Lain-lain | 91654 | 93546 | 92656 | 91795 | 66794 | 13,71 |

*Sumber: Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan.1995:1.*

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk kabupaten Grobogan paling besar sebagai petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 50,25 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang paling kecil adalah sebagai pengusaha dengan persentase 0,52%.

2. Potensi Wilayah

a. Sumber Daya Alam

Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah 197.586,420 hektar (1.975,8642 km²) yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta perbukitan dengan pegunungan yang landai dan curam.

Iklim Kabupaten Grobogan adalah iklim tropis, musim hujan dan kemarau silih berganti disepanjang tahun. Suhu udara minimum 20º C dan maksimum 38ºC. Jumlah curah hujan selama tahun 1979-

1988 adalah 2,084 militer dan jumlah hari hujan selama setahun rata-rata 101 hari.

Tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Grobogan berbeda-beda, sehingga penggunaan tanahnya diperinci menjadi:

1) Tanah sawah seluas 30,83 persen, yang terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 635 persen, irigasi setengah teknis seluas 1,26 persen, irigasi sederhana seluas 1,50 persen, dan tadah hujan seluas 21,72 persen.
2) Tanah kering seluas 30,67 persen yang terdiri dari tanah pekarangan / bangunan seluas 13,85 persen, tegalan seluas 16,77 persen, padang rumput untuk penggembalaan seluas 0,02 persen, kolam ikan seluas 0,03 persen dan rawa seluas 0.001 persen.
3) Hutan negara seluas 34,80 persen
4) Lain-lain (sungai, jalan, kuburan) seluas 3,70 persen

Sumber yang ada (sungai, waduk, telaga, air dalam tanah) sampai pada Pelita IV sudah dimanfaatkan secara baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk rumah tangga, pertanian, industri, tenaga listrik, dan sebagainya.

Kabupaten Grobogan terletak pada pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, maka dari itu banyak potensi pertambangan / barang galian pembangunan daerah. Potensi pertambangan atau barang galian tersebut antara lain pasir, kapur, batu, bangunan, gibs, batu

tepung, batu phosphat, tanah liat, padas, batu lintang, batu traso, api abadi, minyak bumi dan air garam.

Adapun potensi biotik meliputi aneka ragam flora baik itu berupa tumbuhan liar maupun yang dibudidayakan seperti hutan lindung, hutan produksi, tanaman pertanian, tanaman pekarangan dan sebagainya, serta berbagai jenis fauna yang berupa binatang besar dan kecil baik yang diternakkan maupun yang masih liar. Apabila potensi biotik ini dapat dimanfaatkan secara optimal, maka dapat menunjang kelestarian pembangunan daerah.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk pada tahun 1987 di Kabupaten Grobogan sebesar 1.132.958 jiwa yang terdiri dari laki-laki 551.071 jiwa dan 581.887 jiwa. Keadaan penduduk usia produktif sebesar 54,7 persen yang terserap terbanyak dibidang usaha pertanian. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 92 persen penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang besar dengan pembinaaan secara optimal merupakan modal utama yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Potensi yang lebih besar dan berkualitas dari masyarakat kabupaten Grobogan ialah pribadi dan gotong royong yang kesemuanya akan bernilai dalam pembangunan daerah.

**PETA KABUPATEN GROBOGAN**

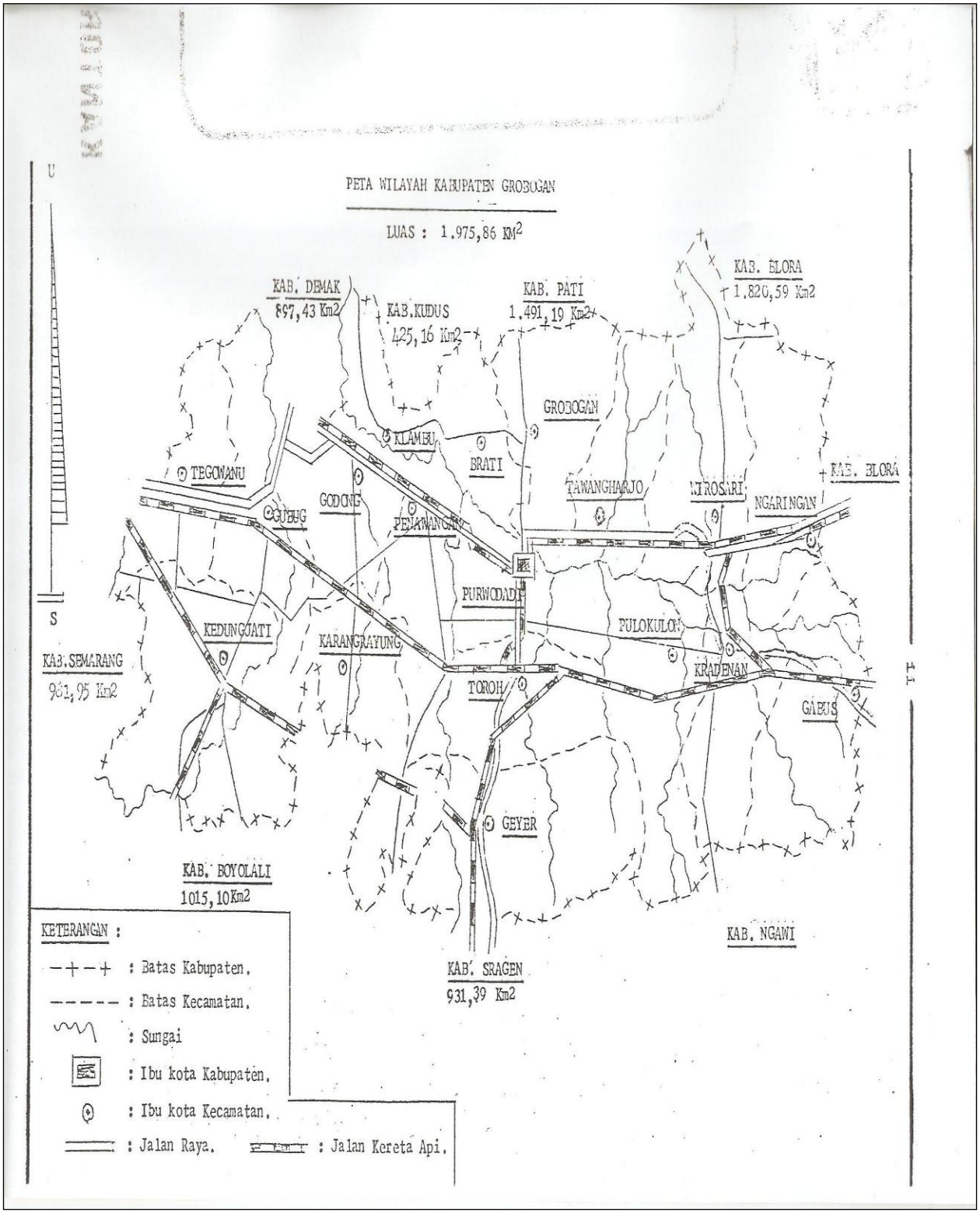


*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan (Kabupaten Grobogan dalam angka 1991)*

1. Kecamatan Kedungjati

Kecamatan Kedungjati teletak di bagian paling barat dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang. Kedungjati merupakan daerah yang menghubungkan antara Salatiga dengan Purwodadi melalui jalan darat, juga menghubungkan antara Semarang dengan Surakarta melalui jalur kereta api. Stasiun Kereta Api Kedungjati merupakan salah satu stasiun tertua di Jawa.

Kecamatan Kedungjati merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50m di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0° - 8°. Nama Kedungjati berarti tempatnya (pusatnya) pohon jati, terbukti pada masa penjajahan Belanda, Kedungjati merupakan pusat hutan atau penghasil kayu jati. Setiap musim kemarau Kedungjati merupakan salah satu daerah yang rawan kesulitan air, hal ini disebabkan daerah yang tandus dan kering.

Potensi di wilayah Kecamatan kedungjati meliputi tanaman pertanian dan perdagangan hasil pertanian diantaranya jagung, padi dan palawija (www.grobogankab.go.id).

2. Kecamatan Karangrayung

Kecamatan Karangrayung terletak di bagian barat selatan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Kecamatan Karangrayung secara garis besar terletak pada 0°- 8°, dan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air

laut. Nama Karangrayung dapat diartikan sebagai batu dan rumput yang tumbuh di pinggir sungai.

Karangrayung memiliki potensi sumber daya alam cukup baik, diantaranya batu kapur yang dapat menjadi bahan baku pembuatan semen. Komoditi mayoritas dari daerah ini antara lain kayu jati, mahoni, padi, tembakau, jagung dan palawija. Wilayah selatan ibu kota Kecamatan tepatnya di Desa Sumberjosari, Ketro, Gunungtumpeng dan Sendangharjo yang merupakan wilayah hutan jati yang sebagian besar dikelola oleh Perhutani. Selain itu banyak penduduk yang membudidayakan pohon jati di pekarangan mereka karena dapat tumbuh subur serta nilai jual yang relatif tinggi.

Pada daerah bagian Timur seperti di Desa Cekel, Mangin, dan sebagainya pada musim kemarau menghasilkan tembakau kualitas bagus. Di Desa Sumberjosari tepatnya pada Selatan Sendang Krandekan terdapat BBI (Balai Benih Ikan) yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Budidaya ikan cukup bagus disokong oleh sumber mata air yang lancar. Ekonomi Kecamatan Karangrayung berkembang baik mengingat letaknya yang cukup dekat dari ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan (www.grobogankab.go.id).

3. Kecamatan Penawangan

Kecamatan Penawangan merupakan daerah yang datar dan terletak diantara 6 Kecamatan lainnya, yaitu Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Karangrayung dan Toroh.

Adapun potensi di wilayah Kecamatan Penawangan, seperti kecamatan lain di Kabupaten Grobogan meliputi tanaman pertanian padi, jagung, palawija, serta buah semangka dan melon. Tanaman buah semangka merupakan komoditi andalan dari daerah ini yang sudah terkenal sampai ke Jawa Barat diantaranya Cirebon, Majalengka dan Jakarta (www.grobogankab.go.id).

4. Kecamatan Toroh

Secara Geografis, Kecamatan Toroh terletak di lembah subur Pegunungan Kendeng. Bagian selatan kecamatan ini berada di jajaran pegunungan Kendeng. Kecamatan Toroh merupakan daerah yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah yang berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15°.

Kecamatan Toroh terletak dan berbatasan langsung dengan Kota Purwodadi di sebelah selatan. Jarak ibukota kecamatan dengan Kota Purwodadi sekitar 3-5 km. Aksesibilitas Kecamatan ini tergolong tinggi, karena berbatasan langsung dengan Kota Purwodadi serta memiliki akses jalan yang cukup bagus. Kecamatan ini terletak di antara kota Surakarta dan Purwodadi.

Potensi di kecamatan ini yaitu pertanian, dimana 6 desa masih tadah hujan, sedangkan 10 desa memperoleh irigasi teknis dari Waduk Kedungombo. Produksi pertanian terbesar di kecamatan ini adalah komoditas jagung (www.grobogankab.go.id).

5. Kecamatan Geyer

Kecamatan Geyer merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 100 - 500 m di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15°. Kecamatan Geyer terletak di bagian selatan Kota Purwodadi dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sragen.

Potensi di wilayah Kecamatan ini meliputi pertanian diantaranya padi dan palawija, serta peternakan sapi dan kambing (www.grobogankab.go.id).

6. Kecamatan Pulokulon

Kecamatan Pulokulon merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan mencapai 15°. Kecamatan Pulokulon teletak di sebelah timur kota Purwodadi dan merupakan kecamatan yang memiliki obyek wisata Sendang Coyo.

Pulokulon berarti "desa Bagian Barat". Pada jaman dulu terdapat 3 (tiga) desa yaitu Pulokulon, Jetaksari dan Panunggalan. Wilayah Pulokulon terletak di lereng ketinggian, Jetaksari merupakan tanah datar,

sementara Panunggalan merupakan gabungan dari beberapa dusun yang terletak di daerah Kedung. Kemudian pada suatu saat disepakati perlunya dibentuk sebuah kecamatan, dan karena Desa Pulokulon terletak di ketinggian maka disepakati menjadi ibukota kecamatan.

7. Kecamatan Kradenan

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan merupakan daerah perbukitan serta berada pada ketinggian antara 50 - 100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°- 15°. Kecamatan Kradenan terletak di bagian timur kota Purwodadi. Jarak antara Purwodadi dan Kradenan kurang lebih 27 Km ke arah timur.

Di kecamatan ini, tepatnya di Desa Kuwu, berlokasi subjek geologi yang khas, Bledug Kuwu, berupa kawah lumpur (mud volcano) yang secara rutin melepaskan lumpur dari perut bumi.

Adapun potensi di wilayah Kecamatan Kradenan ini meliputi pertanian padi dan palawija, serta peternakan sapi (www.grobogankab.go.id).

8. Kecamatan Gabus

Kecamatan Gabus merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan, pada ketinggian antara 50 -100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15°. Kecamatan Gabus teletak di bagian paling timur dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi.

Adapun potensi di wilayah Kecamatan ini meliputi pertanian padi, palawija, dan jagung, serta peternakan sapi (www.grobogankab.go.id).

9. Kecamatan Ngaringan

Kecamatan Ngaringan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian antara 50 -100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15°. Kecamatan Ngaringan teletak di bagian paling timur dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora.

Adapun potensi di wilayah Kecamatan Ngaringan ini meliputi pertanian padi dan palawija, serta peternakan sapi (www.grobogankab.go.id).

10. Kecamatan Wirosari

Kecamatan Wirosari merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian yang berbeda-beda seperti Wirosari sebelah selatan memiliki ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Untuk wilayah Wirosari sebelah utara memiliki ketinggian antara 50 -100 meter di atas permukaan laut dengan kelerengan 8°-15°.

Kecamatan Wirosari teletak di bagian timur Kabupaten Grobogan. Kira-kira jarak antara Purwodadi dengan Wirosari sekitar 20 Km. Adapun potensi di wilayah Kecamatan ini meliputi pertanian padi,

jagung, dan kedelai, serta produksi genteng, batu bata, dan kerajinan tangan (www.grobogankab.go.id).

11. Kecamatan Tawangharjo

Tawangharjo adalah sebuah kecamatan yang cukup strategis di sisi timur Kabupaten Grobogan, yang berada di jalur alternatif bagi jalur Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah.

Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Tawangharjo terletak di sebelah timur kota Purwodadi. Jarak Kecamatan Tawangharjo dengan Purwodadi kira-kira 11 Km ke arah timur.

Adapun Potensi di kecamatan ini meliputi pertanian (padi, jagung, kacang, dan kedelai), peternakan (sapi, kambing, dan ayam buras), serta hutan rakyat (pohon jati dan mahoni) (www.grobogankab.go.id).

12. Kecamatan Grobogan

Kecamatan Grobogan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kabupaten Grobogan, terletak disebelah utara kota Purwodadi.

Adapun Potensi di wilayah kecamatan ini meliputi pertanian (padi, palawija), perikanan (lele, nila), serta peternakan (sapi, kambing, ayam buras dan ras) (www.grobogankab.go.id).

13. Kecamatan Purwodadi

Purwodadi adalah ibu kota dan sebuah kecamatan di Kabupaten Grobogan, merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Bagian timur dengan geografi berbentuk lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara.

Dua pegunungan tersebut terdiri dari hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan disamping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah.

Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk juga terdapat banyak aliran sungai, jalan raya dan jalan kereta api. Adapun Potensi di wilayah kecamatan ini meliputi pertanian (padi, palawija), serta industri (kecap, mie dan pakan ternak) (www.grobogankab.go.id).

14. Kecamatan Brati

Kecamatan Brati merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Brati terletak di bagian utara purwodadi. Jarak antara Brati dengan Purwodadi kira-kira 12 Km.

Potensi di wilayah kecamatan ini meliputi hasi-hasil pertanian padi dan palawija (www.grobogankab.go.id).

15. Kecamatan Klambu

Kecamatan Klambu memiliki daerah perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50-100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8° - 15°. Kecamatan ini teletak di bagian barat laut dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus.

Potensi di wilayah kecamatan ini meliputi hasil-hasil pertanian (padi, palawija), dan adanya waduk yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah (www.grobogankab.go.id).

16. Kecamatan Godong

Kecamatan Godong merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Godong teletak di sebelah barat kota Purwodadi dan jarak antara kedua kota tersebut sekitar 18 Km.

Potensi di wilayah kecamatan ini yaitu meliputi hasil-hasil pertanian dan peternakan, serta wisata Api Abadi Mrapen (www.grobogankab.go.id).

17. Kecamatan Gubug

Kecamatan Gubug merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Gubug teletak di bagian barat kota Purwodadi. Jarak antara keduanya sekitar 30 km.

Kecamatan Gubug merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Grobogan setelah ibukota kabupaten, Purwodadi. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tegowanu dan Tanggungharjo. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tanggungharjo dan Kedungjati. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Godong dan Karangrayung. Serta di utara berbatasan dengan kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak dan Wonosalam.

Gubug berada pada jalur pantai utara Jawa Tengah poros tengah yang menghubungkan kota Semarang dengan Purwodadi. Kecamatan ini dilintasi jalur kereta api yang menghubungkan Semarang-Cepu -Surabaya.

Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah sebagai petani padi dengan musim tanam maksimal 2 kali setahun. Sistem pengairan 45% adalah sistem tadah hujan, sedangkan pengairan diperoleh dari sungai Tuntang yang bermata air di Ambarawa. Adapun potensi di wilayah kecamatan ini meliputi hasil-hasil pertanian (padi, palawija), dan industri rumah tangga (kecap, sirup dan tahu tempe) (www.grobogankab.go.id).

18. Kecamatan Tegowanu

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Tegowanu teletak di bagian paling barat dan merupakan perbatasan antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.

Seluruh wilayah kecamatan ini merupakan dataran rendah, yang digunakan untuk areal pertanian. Hasil pertanian yang diandalkan adalah beras, sehingga daerah ini merupakan pemasok utama kebutuhan beras bagi kota Semarang, selain kecamatan lain di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Di beberapa desa antara lain Desa Sukorejo, Desa Kebonagung dan Desa Tlogorejo merupakan penghasil tembakau yang berkualitas cukup baik sebagai pemasok bahan baku bagi beberapa pabrik rokok di Kabupaten Kudus.

Selain itu, di wilayah kecamatan ini terdapat hasil pertanian palawija, perikanan lele, serta peternakan (sapi, kerbau, ayam buras dan non ras) (www.grobogankab.go.id).

19. Kecamatan Tanggungharjo

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan merupakan daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian

sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0°-8°. Kecamatan Tanggungharjo teletak di bagian barat Kabupaten Grobogan.

Potensi di wilayah kecamtan ini meliputi pertanian (padi, palawija, tembakau), peternakan (sapi, kambing, ayam), pertambangan (batu kapur, batu urug), serta perindustrian (base camp, tobong gamping/kapur, tahu) (www.grobogankab.go.id).

## C. Sejarah Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat dikediaman Ir. Soekarno, Ir. Soekarno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi ini segera disebarluaskan di masyarakat. Di Grobogan, berita proklamasi diterima dari Semarang melalui komunikasi kereta api baik melalui Demak, Godong, Purwodadi maupun melalui Gubug. Setelah kabar proklamasi diterima oleh pemerintahan Grobogan, maka segera lah dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang dipimpin oleh Soepoyo. Anggota BKR terdiri dari bekas PETA, Heiho, Kaigun, pemuda-pemuda pelopor, Hisbullah, dan pelajar.

Pada masa Agresi Militer pertama, Grobogan merupakan salah satu daerah yang ingin diduduki Belanda. Akan tetapi, pasukan BKR, Pasukan Hisbullah, dan Pasukan Sabilillah berhasil mempertahankan Grobogan dari serangan Agresi Militer pertama. Agresi Militer Belanda pertama mendapat ancaman dari dunia Internasional termasuk dari PBB. Pada tanggal 15 Agustus

1947, Indonesia dan Belanda bersepakat menghentikan genjatan senjata. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dan Belanda bersepakat mendatangani perjanjian Renville. Ketika keadaan mulai tenang, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan di Madiun ini juga merembes dan mempengaruhi daerah Kabupaten Grobogan. Pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh defisi Siliwangi. Sementara akibat dari pemberontakan-pemberontakan PKI belum selesai, Belanda melakukan Agresi Militer lagi yang dikenal dengan Agresi Militer kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Purwodadi diserang dengan pesawat udara, akan tetapi baru pada tanggal 21 Desember 1948, Purwodadi diserang besar-besaran oleh Belanda dari arah Barat. Akibat dari serangan ini Purwodadi dapat dikuasai oleh Belanda.

Pada tanggal 29 Desember 1948, Pemuda-pemuda Purwodadi melakukan penyerangan kebasic-basic yang dikuasai oleh Belanda, akibat serangan ini pasukan Belanda dapat dipukul mundur dari Purwodadi. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Indonesia dan pihak Belanda melakukan perjanjian di kota Den Haag, Belanda yang terkenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB) yang salah satu isinya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara De Jure. Setelah perjanjian KMB, dibentuklah RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden. Karena RIS tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka tanggal 17 Agustus 1950 RIS diubah menjadi

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1995:40-53).

Hampir seluruh wilayah di Indonesia pada masa ini mengalami masalah perekonomian, termasuk di Kabupaten Grobogan. Masalah pertama yang sangat mendesak untuk segera ditangani di Kabupaten Grobogan yaitu keadaan ekonomi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui masyarakat Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Dengan demikian penanganan terhadap keadaan lahan pertanian dan sarana penunjangnya perlu segera dilaksanakan. Pada awal tahun 1950-an masih banyak lahan pertanian di wilayah ini menjadi tidak terurus, sehingga mengakibatkan lahan yang sudah ada menjadi kering dan tandus, serta jaringan saluran air disawah-sawah tidak berfungsi lagi.

Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat begitu juga dalam pertanian. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Tetapi dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki, banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dan harus mencari banyak, atau kebanyakan, pendapatan mereka dengan menjadi buruh upahan (Ricklefs, 2007: 472).

Adanya kerusakan di lahan pertanian ini semakin memprihatinkan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang kering dan tandus. Wilayah ini menurut tingkat kesuburan tanahnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu wilayah sebelah barat Kali Serang dan wilayah sebelah timur Kali Serang. Daerah yang berada dibagian barat Kali Serang merupakan daerah yang subur, dan penghasil padi yang paling utama di wilayah Grobogan. Sedangkan daerah sebelah timur Kali Serang merupakan daerah kurang subur, karena toponominya yang terdiri dari pegunungan Kendeng, sehingga hasil utamanya hanyalah berupa tanaman "polowijo". Hanya ironisnya di daerah yang kurang subur tersebut jika musim hujan datang sering mendapatkan bahaya serangan banjir, sehingga kemungkinan untuk meningkatkan produksi padi menjadi terhambat. Akibat yang mengancam dari kondisi pertanian semacam ini adalah musim paceklik panjang jika musim kemarau datang, sehingga di desa-desa muncul wabah busung lapar. Penderitaan seperti ini pada tahun-tahun awal kemerdekaan dapat dikatakan sudah menyatu dengan masyarakat pedesaan Kabupaten Grobogan.

Masalah lain yang erat hubungannya dengan jaringan ekonomi rakyat, dan perlu mendapatkan penanganan adalah masalah komunikasi dan transportasi. Dalam masalah komunikasi pada tahun 1950-an di wilayah kabupaten Grobogan belum berkembang media komunikasi elektronika. Pemilik radio hingga tahun 1960-an ibaratnya masih dapat dihitung dengan jari. Agar komunikasi dapat berjalan, maka pengembangan komunikasi tatap

muka dan surat menyurat perlu dilaksanakan. Oleh karena sifat komunikasi tersebut membutuhkan prasarana dan sarana transportasi, maka masalah ini juga perlu mendapatkan pemecahan.

Banyaknya jalan-jalan yang rusak dan jembatan yang putus membuat sarana transportasi dari dan ke Grobogan menjadi sangat sulit. Hal ini menghambat penyaluran barang dari dan ke Grobogan menjadi terhambat sehingga pasar-pasar menjadi sepi. Selain sarana dan prasarana yang kurang yang menghubungkan antar kota di Grobogan, di Grobogan juga sangat kurang sekali sarana dan prasarana yang menghubungkan antar desa dan kecamatan di Kabupaten Grobogan. Satu-satunya akses yang dapat diandalkan di daerah Grobogan adalah jalur kereta api. Kondisi ini berjalan sampai tahun 1960-an.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang demikian ini membawa akibat yang tidak menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tidak lancarnya arus ekonomi akibat tiadanya jaringan transportasi sangat dirasakan oleh masyarakat Purwodadi, tidak saja yang tinggal di desa-desa melainkan juga yang tinggal di kota. Pada masa panen, khususnya panen “polowijo”, penduduk desa tidak dapat membawa hasil buminya kepasar dengan lancar, sehingga menjadi menumpuk di desa. Kalaupun mereka memaksakan diri membawanya kekota, terpaksa dengan cara memikul atau menggendongnya dan menempuh perjalanan yang panjang. Sebaliknya penduduk desa merasa susah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari,

seperti: garam, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan,1995: 53-54).

Sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas bidang ekonomi (Tambunan, 2001: 21).

Program REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang dimulai tahun 1968-1992 juga mencakup di wilayah Kabupaten Grobogan. Sasaran REPELITA yang ada dikabupaten Grobogan adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak dan sekaligus meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan taraf berikutnya.

Sejak Pelita I, pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Grobogan dititikberatkan pada sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian tersebut berlanjut sampai Pelita IV. Selama Pelita II produksi padi mengalami pasang surut, karena keadaan alam yang kurang menguntungkan seperti adanya bencana alam banjir dan hama, sehingga tidak terlalu terdapat peningkatan produksi padi setiap tahunnya sampai pada Pelita III. Selama Pelita IV dan rencana Pelita V, Pemerintahan Dati II Grobogan telah meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dengan meningkatkan sarana / prasarana produksi. Peningkatan tersebut melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi, diversivikasi dan rehabilitasi dengan secara terpadu serta tetap memelihara kelestarian, sumber dasar alam dan lingkungan hidup. Demikian juga usaha memantapkan kelembagaan pertanian telah ditempuh oleh Pemda Dati II Grobogan dalam usaha pertanian (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan, 1995: 65-67).

# BAB III

# KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT PETANI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1968-1992

## A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Selama beberapa tahun, perekonomian di Indonesia lebih diserahkan kepada politik, prinsip-prinsip ekonomi yang rasional diabaikan dan terjadi pemborosan sumber kekayaan dalam dan luar negeri. Akibat langsung dari hal ini adalah kemerosotan ekonomi yang dibarengi dengan proses hiper-inflasi yang semakin gawat. Kekurangan terasa dibanyak bidang, seperti pangan, tekstil, alat-alat produksi, bahan baku dan lain-lain. Sistem irigasi, perkebunan, pertambangan, pabrik, jaringan jalan, listrik, air minum, kereta api dan fasilitas telekomunikasi praktis terbengkalai. Produksi pangan pun tidak meningkat secepat pertumbuhan penduduk. Hasil ekspor merosot dengan tajam sedangkan kebijakan impor dimungkinkan oleh semakin meningkatnya hutang luar negeri serta lapangan pekerjaan semakin sempit akibat merosotnya kegiatan ekonomi.

Semua ini diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi selama ini yang sangat rendah, lebih-lebih jika dibandingkan dengan tingkat pertambahan penduduk, sehingga secara riil pendapatan per jiwa penduduk mengalami kemunduran atau stagnasi (*http://www.bappenas.go.id*).

Kondisi perekonomian yang demikian tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Grobogan. Masalah yang

sangat mendesak untuk segera ditangani di Kabupaten Grobogan adalah keadaan ekonomi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Dengan demikian penanganan terhadap keadaan lahan pertanian dan sarana penunjangnya perlu segera dilaksanakan. Masih banyak lahan pertanian di wilayah ini menjadi tidak terurus, sehingga mengakibatkan lahan yang sudah ada menjadi kering dan tandus, serta jaringan saluran air disawah-sawah tidak berfungsi lagi. Adanya kerusakan di lahan pertanian ini semakin memprihatinkan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Grobogan yang kering dan tandus.

Masalah lain yang perlu mendapatkan penanganan adalah masalah komunikasi dan transportasi. Tidak lancarnya arus ekonomi akibat tidak adanya jaringan transportasi sangat dirasakan oleh masyarakat Grobogan, tidak saja yang tinggal di desa-desa melainkan juga yang tinggal di kota. Pada masa panen penduduk desa tidak dapat membawa hasil buminya ke pasar dengan lancar, sehingga menjadi menumpuk di desa.

Adanya kondisi jaringan ekonomi antara kota dan desa yang demikian inilah akhirnya melahirkan para tengkulak dan “bakul”. Mereka ini dengan modal yang dimilikinya berusaha memasuki jaringan ekonomi petani dengan jalan membeli hasil panen yang tertimbun dengan harga murah, dan nantinya akan menjual kebutuhan yang diperlukan petani. Di satu sisi memang kelihatan membantu petani dengan jalan memasarkan hasil bumi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain juga menjerat ekonomi

petani, dengan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin sehingga menyebabkan para petani menjadi semakin miskin dan sengsara (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan, 1991 : 54).

Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang demikian ini membawa akibat yang tidak menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tidak lancarnya arus ekonomi akibat tiadanya jaringan transportasi sangat dirasakan oleh masyarakat Grobogan, tidak saja yang tinggal di desa-desa melainkan juga yang tinggal di kota. Pada masa panen, khususnya panen "polowijo", penduduk desa tidak dapat membawa hasil buminya kepasar dengan lancar, sehingga menjadi menumpuk di desa. Kalaupun mereka memaksakan diri membawanya ke kota, terpaksa dengan cara memikul atau menggendongnya dan menempuh perjalanan yang panjang. Sebaliknya penduduk desa merasa susah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: garam, minyak goreng, minyak tanah, dan sebagainya (Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan,1995: 53-54).

Kondisi perekonomian tersebut di atas harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah. Lahirnya Orde Baru memungkinkan perombakan dalam segala bidang terutama dalam bidang ekonomi tersebut yang diwariskan oleh Orde Lama. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam program jangka pendek berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII yang bersasaran pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pencukupan kebutuhan sandang. Tugas pertama dari pemerintahan baru adalah untuk

menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi yang wajar. Untuk memungkinkan ini diperlukan terlebih dahulu pengendalian laju inflasi dan usaha rehabilitasi ekonomi. Hanya apabila laju inflasi telah dapat dikendalikan dan suatu tingkat stabilisasi tercapai, barulah dapat diharapkan pulihnya kegiatan ekonomi yang wajar serta terbukanya kesempatan bagi peningkatan produksi.

Sejak Oktober 1966, secara mantap dilakukan kebijaksanaan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Apabila ditelaah perkembangan ekonomi selama dua tahun terakhir ini, maka terlihatlah bahwa perkembangan yang terjadi lambat tetapi pasti keadaan stabilisasi ekonomi mulai tercapai. Apabila ditahun 1966 tingkat inflasi, sebagaimana tercermin dalam tingkat kenaikan indeks biaya hidup, mencapai 650 persen, maka dalam tahun 1967 tercapailah tingkat inflasi sebesar 120 persen. Sedangkan untuk tahun 1968 tercapai tingkat inflasi sebesar 85 persen (*http://www.bappenas.go.id*).

Di bidang produksipun terdapat kemajuan jika dibandingkan dengan keadaan tahun lalu. Hal ini terutama terlihat dalam produksi beras, tekstil, karet dan lain-lain. Keadaan iklim, tanah dan persediaan tenaga kerja memungkinkan adanya kemajuan di bidang pertanian. Lebih-lebih berkat adanya teknologi baru, bibit-bibit baru, dan cara-cara baru. Peningkatan produksi dibidang pertanian pangan ini akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi. Harga pangan dapat lebih dimantapkan, dan dengan begitu turut memberi pengaruh yang positif pada stabilisasi ekonomi. Dan

hanya dalam ekonomi yang stabillah dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Semua ini memberi pertanda bahwa walaupun lambat tapi landasan bagi dilangsungkannya proses pembangunan akan tercipta. Pembangunan haruslah dilakukan secara bertahap dan berencana dan didasarkan pada kenyataan dan kemampuan yang ada. Perlu ditekankan juga bahwa pembangunan tidaklah segera akan memberi kepuasan dan pemenuhan secara menyeluruh. Hasil pembangunan tidaklah segera akan terasa dan baru akan dipetik beberapa waktu kemudian.

Maka dengan tercapainya landasan-landasan yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan disusunlah pola umum program pembangunan jangka panjang yang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat banyak dan yang sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap yang berikutnya. Rencana tersebut sepenuhnya memperhatikan kemampuan yang ada dan tetap memegang teguh perspektif tujuan jangka panjang. Dengan demikian rencana pembangunan tersebut disusun dengan pendekatan yang realistis dan pragmatis serta berlandaskan pada aspirasi-aspirasi rakyat (*http://www.bappenas.go.id*).

Pola umum program pembangunan jangka panjang yang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XLI tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan, yang salah satunya adalah menyusun dan melaksanakan

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan, 1991: 56).

Oleh karena sifat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) adalah pemberian indikasi arah perkembangan menurut skala prioritas pembangunan yang tertentu maka program-program pembangunan dinyatakan secara umum dan tidak terlalu terperincci. Hal ini wajar mengingat bahan-bahan informasi masih sangat kurang, lebih-lebih untuk memperkirakan perkembangan ekonomi di masa lima tahun ke depan.

Dalam hal ini maka Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) secara terperinci dan lengkap dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai perwujudan rencana tahunan. Dalam rencana tahunan inilah akan lebih terperinci proyek-proyek yang akan dikerjakan, dengan sasaran dan biaya yang terang. Oleh karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka otomatis materi Rencana Pembangunan Lima Tahun menjadi bahan pembahasan bagi lembaga perwakilan rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ini titik beratnya dipusatkan pada bidang pertanian. Dengan demikian medan juang yang dipilih adalah medan pertanian. Disinilah sasaran sentral diletakkan, usaha dipusatkan dan hasil diharapkan.

Pilihan pada sektor pertanian ini bukanlah sekedar pilihan saja. Pilihan didasarkan pada strategi pembangunan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan dibidang pertanian. Serentak dengan majunya sektor pertanian, maka sektor-sektor lain turut pula

terangsang pembangunannya. Peningkatan produksi pertanian menarik sektor industri yang menghasilkan bahan-bahan baku yang diperlukan oleh sektor pertanian. Pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnja akan ikut terangkat oleh peningkatan produksi pertanian sehingga terbukalah kesempatan untuk memperluas produksi dari bahan-bahan ini. Peningkatan produksi pertanian juga memerlukan kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian. Mesin penggilingan padi adalah contoh dari industri yang ikut terangsang pertumbuhannya berkat kemajuan produksi pertanian (*http://www.bappenas.go.id*).

Selain itu sektor pertanian juga dipilih karena sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Grobogan hidup dari sektor ini. Sebagai petani produsen ataupun buruh tani maka sebagian besar masyarakat Kabupaten Grobogan bekerja di sektor pertanian. Maka pembangunan pertanian sekaligus juga meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat Grobogan dan dengan demikian memungkinkan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam menyusun Repelita pertama, disamping digunakan sebagai landasan seluruh hasil Sidang Umum ke-V MPRS, juga diperhatikan perasaan dan keinginan dalam masyarakat, pendapat dari kalangan cendekiawan dan Universitas, hasrat dari daerah dan pandangan dari berbagai kalangan agar rencana pembangunan ini mencerminkan keinginan dan harapan lapisan terbesar masyarakat. Dari sinilah bersumber dukungan masyarakat yang akan menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nantinya.

Di Kabupaten Grobogan, tujuan dari program Repelita ini sama seperti halnya pada skala nasional. Program Repelita yang pertama yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sedangkan sasarannya berupa pangan, sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Program Repelita kedua prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Program Repelita ketiga prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Program Repelita keempat tujuannya adalah peningkatan dari Repelita ketiga. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Sedangkan Program Repelita kelima menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan, 1991 : 65-66).

Dalam melaksanakan program Repelita tersebut pemerintah Kabupaten Grobogan harus memperhatikan berbagai unsur yang akan

menentukan keberhasilan program pembangunan pertanian ini, terutama adalah kondisi luas tanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian nantinya.

Berikut akan dijelaskan kondisi luas tanah di Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil evaluasi penggunaan Tanah dari Repelita I sampai Repelita V diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya.

1. Kondisi luas penggunaan tanah pada Repelita I

   Kondisi luas penggunaan tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita I berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita I**

| No | Luas Penggunaan dari Jenis Tanah | Luas (HA) | (%) |
|---|---|---|---|
| I. | Tanah Sawah | 61.304,186 | 31,02 |
| | 1.1 Berpengairan Tehnis | 11.251,703 | |
| | 1.2 Berpengairan ½ Tehnis | 2.493,365 | |
| | 1.3 Berpengairan Sederhana | 3.592,349 | |
| | 1.4 Tadah Hujan | 43.963,412 | |
| | 1.5 Pasang Surut | - | |
| | 1.6 Lainnya | 3,357 | |
| II. | Tanah Kering | 67.509,204 | 34,17 |
| | 2.1 Tanah untuk Bangunan & Halaman sekitarnya | 24.435,174 | |
| | 2.2 Tegal/Kebonan/Ladang/Huma | 36.283,705 | |
| | 2.3 Padang Rumput | 42,836 | |
| | 2.4 Tambak | - | |
| | 2.5 Kolam/Tebat/Empang | 71,651 | |
| | 2.6 Tanah yang sementara tidak diusahakan | 121,274 | |
| | 2.7 Tanah untuk tanaman kayu-kayuan | 79,520 | |
| | 2.8 Perkebunan Negara/Swasta | - | |
| | 2.9 Tanah Lainnya | 6.475,044 | |
| III. | Hutan Negara | 68.773,030 | 34,81 |
| | Jumlah ( I + II + III ) | 197.586,420 | 100,00 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Grobogan

2. Kondisi luas penggunaan tanah pada Repelita II

Kondisi luas penggunaan tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita II berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita II**

| No | Luas Penggunaan dari Jenis Tanah | Luas (HA) | (%) |
|---|---|---|---|
| I. | Tanah Sawah | 61.173,041 | 30,96 |
| | 1.1 Berpengairan Tehnis | 11.880,572 | |
| | 1.2 Berpengairan ½ Tehnis | 2.274,605 | |
| | 1.3 Berpengairan Sederhana | 3.376,052 | |
| | 1.4 Tadah Hujan | 43.641,812 | |
| | 1.5 Pasang Surut | - | |
| | 1.6 Lainnya | 3,642 | |
| II. | Tanah Kering | 67.645,349 | 34,24 |
| | 2.1 Tanah untuk Bangunan & Halaman sekitarnya | 26.214,452 | |
| | 2.2 Tegal/Kebonan/Ladang/Huma | 34.280,479 | |
| | 2.3 Padang Rumput | 38,593 | |
| | 2.4 Tambak | - | |
| | 2.5 Kolam/Tebat/Empang | 69,359 | |
| | 2.6 Tanah yang sementara tidak diusahakan | 116,354 | |
| | 2.7 Tanah untuk tanaman kayu-kayuan | 76,747 | |
| | 2.8 Perkebunan Negara/Swasta | - | |
| | 2.9 Tanah Lainnya | 6.849,365 | |
| III. | Hutan Negara | 68.768,030 | 34,80 |
| | Jumlah ( I + II + III ) | 197.586,420 | 100,00 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Grobogan

3. Kondisi luas penggunaan tanah pada Repelita III

Kondisi luas penggunaan tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita III berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita III**

| No | Luas Penggunaan dari Jenis Tanah | Luas (HA) | (%) |
|---|---|---|---|
| I | Tanah Sawah | 60.935,045 | 30,84 |
| | 1.1 Berpengairan Tehnis | 12.401,461 | |
| | 1.2 Berpengairan ½ Tehnis | 2.004,740 | |
| | 1.3 Berpengairan Sederhana | 3.185,615 | |
| | 1.4 Tadah Hujan | 42.539,689 | |
| | 1.5 Pasang Surut | - | |
| | 1.6 Lainnya | 3,540 | |
| II. | Tanah Kering | 67.888,345 | 34,36 |
| | 2.1 Tanah untuk Bangunan & Halaman sekitarnya | 27.067,565 | |
| | 2.2 Tegal/Kebonan/Ladang/Huma | 33.164,582 | |
| | 2.3 Padang Rumput | 32,847 | |
| | 2.4 Tambak | - | |
| | 2.5 Kolam/Tebat/Empang | 68,510 | |
| | 2.6 Tanah yang sementara tidak diusahakan | 103,350 | |
| | 2.7 Tanah untuk tanaman kayu-kayuan | 64,327 | |
| | 2.8 Perkebunan Negara/Swasta | - | |
| | 2.9 Tanah Lainnya | 7.387,164 | |
| III. | Hutan Negara | 68.763,030 | 34,80 |
| | Jumlah ( I + II + III ) | 197.586,420 | 100,00 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Grobogan

4. Kondisi luas penggunaan tanah pada Repelita IV

Kondisi luas penggunaan tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita IV berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita IV**

| No | Luas Penggunaan dari Jenis Tanah | Luas (HA) | (%) |
|---|---|---|---|
| I. | Tanah Sawah | 60.542,706 | 30,64 |
| | 1.1 Irigasi tehnis | 12.036,378 | |
| | 1.2 Irigasi setengah tehnis | 1.967,384 | |
| | 1.3 Irigasi sederhana | 2.851,982 | |
| | 1.4 Tadah hujan | 43.686,962 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| II. | Tanah Kering<br>2.1 Pekarangan/Bangunan<br>2.2 Tegalan/Kebunan<br>2.3 Padang gembala<br>2.4 Tambak/Kolam<br>2.5 Rawa | 60.500,759<br>27.453,250<br>32.910,647<br>54,247<br>55,343<br>27,272 | 30,62 |
| III. | Hutan Negara | 68.683,030 | 34,80 |
| IV. | Perkebunan Negara | - | - |
| V. | Lain-Lain<br>( Sungai, Jalan, Kuburan, dll ) | 7.859,925 | 3,98 |
| | Jumlah ( I + II + III + IV + V ) | 197.586,420 | 100,00 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Grobogan

5. Kondisi luas penggunaan tanah pada Repelita V

Kondisi luas penggunaan tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita V berdasarkan hasil evaluasi penggunaan tanah diperinci menurut jenis tanah dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5 Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Grobogan pada Repelita V**

| No | Luas Penggunaan dari Jenis Tanah | Luas (HA) | (%) |
|---|---|---|---|
| I. | Tanah Sawah<br>1.1 Irigasi tehnis<br>1.2 Irigasi setengah tehnis<br>1.3 Irigasi sederhana<br>1.4 Tadah hujan | 60.196,262<br>18.668,993<br>2.914,444<br>1.638,570<br>36.974,255 | 30,47 |
| II. | Tanah Kering<br>2.1 Pekarangan/Bangunan<br>2.2 Tegalan/Perkebunan<br>2.3 Padang gembala<br>2.4 Tambak/Kolam<br>2.5 Rawa-rawa | 59.687,077<br>28.841,551<br>30.749,036<br>21,271<br>67,919<br>7,300 | 30,21 |
| III. | Hutan Negara | 68.670,530 | 34,75 |
| IV. | Perkebunan Negara | - | - |
| V. | Lain-Lain<br>( Sungai, Jalan, Kuburan, dll ) | 9.032,551 | 4,57 |
| | Jumlah | 197.586,420 | 100,00 |

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Grobogan

## B. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Grobogan

Sebagaimana diketahui, kondisi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Grobogan sebagian besar didominasi oleh petani. Untuk lebih jelasnya, persebaran dan persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Mata Pencaharian Penduduk dan Persentase di Kabupaten Grobogan**

| No | Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| 1. | Petani | 297462 | 309814 | 306145 | 348629 | 337999 | 50,25 |
| 2. | Buruh tani | 169573 | 161258 | 163783 | 156343 | 156294 | 25,35 |
| 3. | Pengusaha | 2191 | 2573 | 2824 | 4674 | 4290 | 0,52 |
| 4. | Buruh industri | 4614 | 6744 | 8812 | 12779 | 13794 | 1,47 |
| 5. | Buruh bangunan | 13352 | 15390 | 17269 | 27487 | 34189 | 3,38 |
| 6. | Pedagang | 6530 | 7245 | 8091 | 13487 | 17425 | 1,66 |
| 7. | Angkutan | 2074 | 2638 | 3061 | 5330 | 5544 | 0,59 |
| 8. | Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 11461 | 12792 | 15010 | 16741 | 18217 | 2,33 |
| 9. | Pensiunan | 4026 | 4273 | 4544 | 5308 | 5478 | 0,74 |
| 10. | Lain-lain | 91654 | 93546 | 92656 | 91795 | 66794 | 13,71 |

*Sumber: Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan.1995:1.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kabupaten Grobogan paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 50,25 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,52 %.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Grobogan tersebut jika dibagi per kecamatan maka akan dapat dilihat seperti di bawah ini.

20. Kecamatan Kedungjati

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kedungjati adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kedungjati**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 15903 | 17540 | 19357 | 32124 | 13102 | 53,17 |
| Buruh tani | 14500 | 11671 | 10224 | 4430 | 1769 | 23,10 |
| Pengusaha | 23 | 35 | 43 | 162 | 106 | 0,200 |
| Buruh industri | 508 | 710 | 849 | 1016 | 638 | 2,02 |
| Buruh bangunan | 1423 | 1506 | 1662 | 1446 | 1326 | 3,99 |
| Pedagang | 207 | 354 | 287 | 588 | 393 | 0,99 |
| Angkutan | 98 | 105 | 120 | 285 | 123 | 0,40 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 1261 | 1400 | 1440 | 1383 | 833 | 3,43 |
| Pensiunan | 421 | 530 | 551 | 599 | 349 | 1,33 |
| Lain-lain | 5167 | 5293 | 5486 | 3327 | 1691 | 11,37 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kedungjati paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 53,17 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah sopir angkutan dengan persentase 0,40 %.

21. Kecamatan Karangrayung

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Karangrayung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Karangrayung**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 35254 | 38461 | 40195 | 36013 | 28274 | 78,74 |
| Buruh tani | 3022 | 3160 | 3204 | 1264 | 1129 | 5,21 |
| Pengusaha | 25 | 31 | 39 | 46 | 49 | 0,08 |
| Buruh industri | 395 | 450 | 519 | 648 | 676 | 1,19 |
| Buruh bangunan | 1453 | 1507 | 1770 | 2377 | 2377 | 4,19 |
| Pedagang | 432 | 576 | 696 | 2745 | 3016 | 3,30 |
| Angkutan | 90 | 95 | 105 | 109 | 120 | 0,23 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 730 | 835 | 930 | 1051 | 1125 | 2,06 |
| Pensiunan | 125 | 155 | 170 | 180 | 179 | 0,36 |
| Lain-lain | 2230 | 2305 | 2400 | 1886 | 1688 | 4,64 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Karangrayung paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 78,74 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,08 %.

22. Kecamatan Penawangan

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Penawangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Penawangan**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 8230 | 9100 | 9328 | 12397 | 7987 | 41,72 |
| Buruh tani | 1926 | 10207 | 10941 | 11202 | 11581 | 40,67 |
| Pengusaha | 8 | 10 | 11 | 77 | 109 | 0,19 |
| Buruh industri | 156 | 210 | 288 | 690 | 484 | 1,62 |
| Buruh bangunan | 1126 | 1190 | 1205 | 2101 | 1940 | 6,71 |
| Pedagang | 143 | 186 | 208 | 395 | 714 | 1,46 |
| Angkutan | 35 | 43 | 51 | 226 | 174 | 0,47 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 383 | 420 | 586 | 662 | 791 | 2,52 |
| Pensiunan | 87 | 105 | 125 | 160 | 189 | 0,59 |
| Lain-lain | 420 | 450 | 498 | 1619 | 1580 | 4,05 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Penawangan paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 41,72 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,19 %.

23. Kecamatan Toroh

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Toroh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Toroh**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 16238 | 16870 | 17351 | 15774 | 15169 | 28,04 |
| Buruh tani | 20541 | 22650 | 25894 | 27919 | 18852 | 39,91 |
| Pengusaha | 750 | 805 | 911 | 738 | 864 | 1,40 |
| Buruh industri | 395 | 430 | 488 | 1980 | 1490 | 1,65 |
| Buruh bangunan | 1560 | 1626 | 1735 | 3536 | 2640 | 3,82 |
| Pedagang | 187 | 210 | 265 | 1578 | 1414 | 1,26 |
| Angkutan | 55 | 75 | 92 | 481 | 207 | 0,31 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 910 | 1021 | 1045 | 1329 | 355 | 1,61 |
| Pensiunan | 292 | 315 | 382 | 524 | 647 | 0,74 |
| Lain-lain | 13501 | 13900 | 14019 | 12158 | 8143 | 21,26 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Toroh paling besar adalah buruh tani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 39,91 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah sopir angkutan dengan persentase 0,31 %.

24. Kecamatan Geyer

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Geyer adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Geyer**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 14557 | 15280 | 15810 | 19906 | 14940 | 59,24 |
| Buruh tani | 2167 | 2390 | 2505 | 1851 | 2062 | 8,08 |
| Pengusaha | 5 | 7 | 2 | 297 | 477 | 0,58 |
| Buruh industri | 550 | 632 | 683 | 1033 | 1237 | 3,04 |
| Buruh bangunan | 821 | 890 | 905 | 1669 | 1474 | 4,24 |
| Pedagang | 247 | 301 | 318 | 648 | 659 | 1,6 |
| Angkutan | 320 | 407 | 452 | 269 | 276 | 1,27 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 631 | 697 | 714 | 799 | 1055 | 2,87 |
| Pensiunan | 259 | 315 | 335 | 393 | 460 | 1,3 |
| Lain-lain | 6905 | 7106 | 7112 | 1449 | 1596 | 17,78 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Geyer paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 59,24 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,58 %.

25. Kecamatan Pulokulon

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pulokulon adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Pulokulon**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 3180 | 3250 | 3348 | 35396 | 36682 | 41,67 |
| Buruh tani | 18290 | 18935 | 19020 | 17026 | 16499 | 45,70 |
| Pengusaha | 5 | 8 | 10 | 25 | 26 | 0,04 |
| Buruh industri | 215 | 268 | 281 | 316 | 759 | 0,94 |
| Buruh bangunan | 290 | 349 | 385 | 724 | 441 | 1,11 |
| Pedagang | 265 | 302 | 310 | 310 | 534 | 0,88 |
| Angkutan | 95 | 120 | 150 | 243 | 350 | 0,49 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 824 | 870 | 713 | 829 | 993 | 2,15 |
| Pensiunan | 100 | 159 | 199 | 241 | 272 | 0,49 |
| Lain-lain | 1610 | 1645 | 1660 | 5188 | 2714 | 6,52 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pulokulon paling besar adalah buruh tani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 45,70 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,04 %.

26. Kecamatan Kradenan

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kradenan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kradenan**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 17450 | 17789 | 17806 | 23299 | 24541 | 51,89 |
| Buruh tani | 4060 | 4165 | 4292 | 8429 | 8365 | 15,08 |
| Pengusaha | 69 | 95 | 104 | 445 | 391 | 0,57 |
| Buruh industri | 123 | 160 | 196 | 509 | 535 | 0,78 |
| Buruh bangunan | 578 | 610 | 636 | 10272 | 1804 | 7,15 |
| Pedagang | 536 | 599 | 616 | 1419 | 1360 | 2,33 |
| Angkutan | 56 | 79 | 92 | 217 | 220 | 0,34 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 803 | 850 | 869 | 974 | 1041 | 2,33 |
| Pensiunan | 316 | 340 | 380 | 267 | 300 | 0,82 |
| Lain-lain | 4190 | 4300 | 4479 | 11135 | 12251 | 18,70 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kradenan paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 51,89 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah sopir angkutan dengan persentase 0,34 %.

27. Kecamatan Gabus

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gabus adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gabus**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 543 | 600 | 675 | 19667 | 29294 | 38,44 |
| Buruh tani | 3208 | 3500 | 3742 | 927 | 7291 | 14,13 |
| Pengusaha | 4870 | 5021 | 5778 | 888 | 175 | 12,67 |
| Buruh industri | 960 | 1011 | 10301 | 628 | 633 | 10,24 |
| Buruh bangunan | 3210 | 3469 | 3997 | 718 | 343 | 8,89 |
| Pedagang | 209 | 258 | 315 | 827 | 719 | 1,76 |
| Angkutan | 88 | 107 | 128 | 500 | 261 | 0,82 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 580 | 600 | 612 | 862 | 855 | 2,66 |
| Pensiunan | 112 | 124 | 183 | 292 | 350 | 0,80 |
| Lain-lain | 1871 | 1900 | 2036 | 4081 | 2779 | 9,59 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gabus paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 38,44 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pensiunan dengan persentase 0,80 %.

28. Kecamatan Ngaringan

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ngaringan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ngaringan**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 18904 | 19069 | 20379 | 20387 | 20469 | 71,62 |
| Buruh tani | 4210 | 4507 | 4724 | 3641 | 3325 | 14,72 |
| Pengusaha | 21 | 30 | 38 | 50 | 51 | 0,14 |
| Buruh industri | 6 | 9 | 11 | 87 | 362 | 0,34 |
| Buruh bangunan | 290 | 300 | 376 | 538 | 1104 | 1,88 |
| Pedagang | 324 | 370 | 395 | 564 | 797 | 1,77 |
| Angkutan | 34 | 48 | 57 | 144 | 139 | 0,30 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 412 | 429 | 464 | 219 | 408 | 1,39 |
| Pensiunan | 159 | 210 | 234 | 229 | 336 | 0,84 |
| Lain-lain | 1587 | 1690 | 1819 | 2283 | 2274 | 6,97 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ngaringan paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 71,62 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,14 %.

29. Kecamatan Wirosari

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Wirosari adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Wirosari**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 16578 | 16900 | 17126 | 23243 | 25461 | 45,04 |
| Buruh tani | 8045 | 8237 | 8345 | 8458 | 9326 | 19,24 |
| Pengusaha | 811 | 825 | 854 | 801 | 646 | 1,79 |
| Buruh industri | 1843 | 1987 | 2074 | 616 | 440 | 3,16 |
| Buruh bangunan | 579 | 618 | 633 | 845 | 1551 | 1,92 |
| Pedagang | 710 | 756 | 774 | 1049 | 1016 | 1,95 |
| Angkutan | 120 | 135 | 155 | 180 | 244 | 0,38 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 9730 | 9896 | 1007 | 913 | 1071 | 10,26 |
| Pensiunan | 169 | 216 | 282 | 359 | 382 | 0,64 |
| Lain-lain | 10128 | 10520 | 10782 | 461 | 2577 | 15,63 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Wirosari paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 45,04 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pensiunan dengan persentase 0,64 %.

30. Kecamatan Tawangharjo

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tawangharjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tawangharjo**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 7500 | 7650 | 7726 | 19949 | 9880 | 36,01 |
| Buruh tani | 8146 | 8210 | 8426 | 10726 | 11045 | 31,81 |
| Pengusaha | 36 | 57 | 74 | 16 | 53 | 0,16 |
| Buruh industri | 621 | 630 | 658 | 582 | 636 | 2,14 |
| Buruh bangunan | 110 | 139 | 144 | 360 | 1164 | 1,31 |
| Pedagang | 220 | 243 | 269 | 343 | 325 | 0,96 |
| Angkutan | 9 | 15 | 28 | 41 | 56 | 0,10 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 391 | 440 | 443 | 524 | 584 | 1,62 |
| Pensiunan | 104 | 119 | 125 | 138 | 145 | 0,43 |
| Lain-lain | 8420 | 8504 | 8790 | 4477 | 7070 | 25,46 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tawangharjo paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 36,01 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah sopir angkutan dengan persentase 0,10 %.

31. Kecamatan Grobogan

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Grobogan**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 8395 | 8400 | 8580 | 10072 | 13471 | 34,07 |
| Buruh tani | 7902 | 8610 | 8690 | 7552 | 8343 | 28,63 |
| Pengusaha | 118 | 139 | 144 | 161 | 168 | 0,51 |
| Buruh industri | 670 | 715 | 751 | 1250 | 1529 | 3,42 |
| Buruh bangunan | 625 | 659 | 669 | 879 | 2249 | 3,54 |
| Pedagang | 19 | 39 | 64 | 212 | 320 | 0,46 |
| Angkutan | 106 | 129 | 154 | 313 | 395 | 0,76 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 760 | 800 | 889 | 924 | 962 | 3,02 |
| Pensiunan | 130 | 167 | 185 | 247 | 214 | 0,66 |
| Lain-lain | 9569 | 9700 | 9965 | 4407 | 2156 | 24,93 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan grobogan paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 34,07 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pedagang dengan persentase 0,46 %.

32. Kecamatan Purwodadi

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Purwodadi**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | (%) |
| Petani | 22500 | 22980 | 23889 | 25514 | 24760 | 49,19 |
| Buruh tani | 6100 | 6201 | 6327 | 5998 | 5639 | 12,44 |
| Pengusaha | 70 | 85 | 95 | 539 | 581 | 0,56 |
| Buruh industri | 239 | 256 | 280 | 1124 | 1521 | 1,41 |
| Buruh bangunan | 1290 | 1340 | 1484 | 4133 | 5079 | 5,48 |
| Pedagang | 421 | 430 | 488 | 1581 | 2196 | 2,10 |
| Angkutan | 670 | 700 | 716 | 1483 | 1981 | 2,28 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 2091 | 2102 | 2197 | 2691 | 4171 | 5,45 |
| Pensiunan | 649 | 680 | 686 | 750 | 591 | 1,38 |
| Lain-lain | 9570 | 9602 | 9965 | 10253 | 8524 | 19,70 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Purwodadi paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 49,19 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,56 %.

33. Kecamatan Brati

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Brati adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Brati**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | (%) |
| Petani | 8710 | 8790 | 8839 | 12447 | 9681 | 47,28 |
| Buruh tani | 7901 | 8120 | 8157 | 5358 | 8814 | 37,41 |
| Pengusaha | 7 | 15 | 18 | 23 | 25 | 0,09 |
| Buruh industri | 13 | 20 | 27 | 237 | 289 | 0,57 |
| Buruh bangunan | 126 | 139 | 148 | 187 | 462 | 1,04 |
| Pedagang | 30 | 49 | 56 | 56 | 22 | 0,21 |
| Angkutan | 8 | 12 | 15 | 18 | 148 | 0,20 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 312 | 320 | 326 | 463 | 347 | 1,72 |
| Pensiunan | 35 | 48 | 55 | 58 | 90 | 0,28 |
| Lain-lain | 1280 | 1307 | 1416 | 6227 | 1256 | 11,21 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Brati paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 47,28 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,09 %.

34. Kecamatan Klambu

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Klambu**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 6490 | 6540 | 6656 | 5425 | 5677 | 35,09 |
| Buruh tani | 4080 | 4100 | 4191 | 7374 | 7505 | 31,06 |
| Pengusaha | 7 | 10 | 4 | 22 | 30 | 0,08 |
| Buruh industri | 59 | 70 | 87 | 278 | 458 | 1,09 |
| Buruh bangunan | 489 | 500 | 516 | 915 | 1042 | 3,95 |
| Pedagang | 41 | 53 | 60 | 104 | 214 | 0,54 |
| Angkutan | 16 | 26 | 33 | 25 | 24 | 0,14 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 236 | 251 | 267 | 293 | 335 | 1,58 |
| Pensiunan | 62 | 81 | 90 | 143 | 137 | 0,58 |
| Lain-lain | 3954 | 3980 | 4018 | 4914 | 5854 | 25,90 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Klambu paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 35,09 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,08 %.

35. Kecamatan Godong

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Godong adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.22 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Godong**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 16809 | 16870 | 16992 | 17466 | 17657 | 40,75 |
| Buruh tani | 10123 | 10290 | 10396 | 14512 | 15207 | 28,75 |
| Pengusaha | 58 | 82 | 94 | 102 | 156 | 0,23 |
| Buruh industri | 420 | 437 | 452 | 541 | 443 | 1,09 |
| Buruh bangunan | 1098 | 1106 | 1177 | 1288 | 1586 | 2,97 |
| Pedagang | 1780 | 1802 | 1826 | 1629 | 1792 | 4,19 |
| Angkutan | 339 | 365 | 382 | 395 | 276 | 0,83 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 1165 | 1193 | 1209 | 1108 | 1126 | 2,76 |
| Pensiunan | 231 | 250 | 272 | 285 | 301 | 0,64 |
| Lain-lain | 9738 | 9760 | 9771 | 6729 | 1438 | 17,78 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Godong paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 40,75 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,23 %.

36. Kecamatan Gubug

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gubug adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gubug**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 11500 | 11590 | 11659 | 11645 | 12953 | 38,90 |
| Buruh tani | 11680 | 11713 | 11730 | 11710 | 9792 | 37,11 |
| Pengusaha | 202 | 221 | 234 | 251 | 267 | 0,77 |
| Buruh industri | 491 | 501 | 515 | 532 | 622 | 1,74 |
| Buruh bangunan | 2731 | 2760 | 2788 | 3368 | 4833 | 10,80 |
| Pedagang | 820 | 874 | 899 | 916 | 1185 | 3,08 |
| Angkutan | 231 | 258 | 279 | 306 | 329 | 0,92 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 782 | 801 | 818 | 874 | 997 | 2,80 |
| Pensiunan | 149 | 170 | 206 | 243 | 271 | 0,68 |
| Lain-lain | 1104 | 1120 | 1124 | 545 | 979 | 3,20 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Gubug paling besar adalah petani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 38,90 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pensiunan dengan persentase 0,68 %.

37. Kecamatan Tegowanu

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tegowanu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.24 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tegowanu**

| Pekerjaan | Tahun | | | | | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1978 | 1983 | 1988 | 1992 | |
| Petani | 7020 | 7026 | 7037 | 7905 | 8175 | 40,47 |
| Buruh tani | 7457 | 7470 | 7491 | 7966 | 8426 | 42,26 |
| Pengusaha | 13 | 19 | 22 | 31 | 37 | 0,13 |
| Buruh industri | 310 | 328 | 337 | 672 | 789 | 2,65 |
| Buruh bangunan | 751 | 772 | 796 | 1293 | 1461 | 5,52 |
| Pedagang | 219 | 236 | 245 | 516 | 547 | 1,92 |
| Angkutan | 27 | 45 | 52 | 95 | 128 | 0,38 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 441 | 467 | 481 | 511 | 544 | 2,66 |
| Pensiunan | 42 | 59 | 76 | 98 | 104 | 0,41 |
| Lain-lain | 609 | 620 | 623 | 856 | 585 | 3,59 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tegowanu paling besar adalah buruh tani dengan persentase kumulatif dari 5 tahun tersebut sebesar 42,26 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,13 %.

38. Kecamatan Tanggungharjo

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tanggungharjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.25 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tanggungharjo**

| Pekerjaan | Tahun 1992 | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Petani | 9826 | 64,45 |
| Buruh tani | 1326 | 8,70 |
| Pengusaha | 79 | 0,52 |
| Buruh industri | 478 | 3,14 |
| Buruh bangunan | 995 | 6,53 |
| Pedagang | 295 | 1,94 |
| Angkutan | 92 | 0,60 |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 624 | 4,09 |
| Pensiunan | 261 | 1,71 |
| Lain-lain | 1269 | 8,32 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dati II Grobogan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tanggungharjo tahun 1992 paling besar adalah petani dengan persentase sebesar 64,45 %. Sedangkan mata pencaharian penduduk paling kecil adalah pengusaha dengan persentase 0,52 %.

# BAB IV

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN GROBOGAN

## A. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan di Kabupaten Grobogan

### 1. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan pada Pelita I

Pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pencapaian swasembada pangan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan sejak Pelita I dititikberatkan pada sektor pertanian. Usaha-usaha untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi, sudah banyak dilakukan sejak awal pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak Pelita I ini telah giat mengupayakan peningkatan produksi pertanian baik dengan sistem Bimas, Inmas, penggunaan varietas bibit unggul dan sebagainya. Penggunaan sistem Bimas Inmas ini dimaksudkan agar petani menjadi lebih terbuka terhadap inovasi di bidang pertanian serta terbiasa menggunakan cara-cara bertani dengan menggunakan sistem yang lebih maju/modern.

Dalam mengupayakan tercapainya peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Pertanian juga didukung oleh Departemen Pertanian yang pada waktu itu melakukan penambahan petugas penyuluh dalam jumlah yang cukup besar. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penyuluhan kepada petani, agar mau dan mampu menerapkan teknologi Panca Usaha (Wawancara, Ir. Edhie Sudarwanto, MM : Juli 2012).

Peranan penyuluh pertanian ialah untuk memberi nasehat kepada petani tentang cara-cara untuk meningkatkan daya produksi usaha tani mereka. Penyuluh pertanian mengajarkan petani tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat menjalankan teknik-teknik yang baru, serta membantu petani memperoleh sarana produksi dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan teknik-teknik baru di dalam usahatani tersebut (Wawancara, Ir. Edhie Sudarwanto, MM : Juli 2012).

Bersamaan dengan penambahan petugas penyuluhan tersebut, dibangun pula unsur Catur Sarana lainnya dalam program Bimas di sentra-sentra produksi padi di seluruh pelosok tanah air termasuk di Kabupaten Grobogan, seperti penyediaan pelayanan perkreditan dengan didirikannya BRI Unit Desa, Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memperlancar penyaluran sarana produksi pupuk dan pestisida, peningkatan jumlah kios sarana produksi, peningkatan jumlah produksi pupuk, pemberi subsidi harga pupuk dan pestisida dan lain sebagainya (Wawancara, Ir. Edhie Sudarwanto, MM : Juli 2012).

Tiga kebijakan penting yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada periode ini adalah; (1) Intensifikasi, (2) Ekstensifikasi, (3) Diversifikasi yang didukung oleh kemampuan meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Dalam konteks usaha tani, intensifikasi ialah penggunaan teknologi biologi, kimia, dan mekanis. Penggunaan teknologi biologi dan kimia ini dalam pelaksanaannya dikonsepsikan sebagai panca usaha tani. Panca usaha tani mencakup lima paket teknologi usaha tani modern yang terdiri dari: (1)

penyediaan bibit varietas unggul serta varietas unggul tahan wereng (VUTW), (2) penggunaan pupuk, (3) perbaikan dan pembangunan fasilitas dan sistem irigasi, (4) pemberantasan hama dan penyakit, dan (5) perbaikan cara-cara bercocok tanam. Sementara ekstensifikasi adalah perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi areal persawahan dan pertanian lainnya. Diversifikasi adalah penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, sampai pada usaha tani terpadu peternakan dan perikanan yang telah menjadi andalan masyarakat pedesaan umumnya (Sri Margono dkk, 2010 : 219-220).

Pelaksanaan program Intensifikasi mengandung tiga prinsip kegiatan pokok, yaitu:

a. Diadakan kegiatan penyuluhan pertanian untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani tentang panca usaha tani dan kemudian mendorongnya untuk menerapkannya dalam usaha tani
b. Diadakannya penyaluran sarana produksi sehingga petani dapat memperoleh sarana produksi pertanian yang diperlukan untuk menerapkan panca usaha dengan murah, mudah dalam jumlah dan waktu yang tepat
c. Diadakannya penyediaan kredit untuk memungkinkan para petani membeli sarana produksi pertanian yang diperlukan, dan dapat dibayar kembali sesudah panen.

Selain untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, program ini sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, disamping

untuk memperluas kesempatan kerja, menghemat devisa, serta menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam (Sri Margono dkk, 2010: 220-221).

Pada Pelita I ini, pemerintah orde baru mengubah kelembagaan program Bimas Nasional yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya menjadi Program Bimas Gotong Royong. Disebut Bimas Gotong Royong karena adanya kerjasama pemerintah dengan perusahaan swasta asing, terutama dalam hal pendanaan dan pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida). Dalam hal penyaluran pupuk, obat-obatan dan bibit masih ditemui kesulitan seperti halnya dalam Bimas Nasional. Masalah tersebut berkisar pada masalah kualitas, keterlambatan dalam penyalurannya (Sri Margono dkk, 2010: 224).

Setelah dilakukan evaluasi mengenai kebijakan Bimas Gotong Royong, disadari bahwa dalam pelaksanaan Bimas Gotong Royong ditemukan banyak kekurangan, antara lain (1) pengaturan sarana produksi yang sering tidak tepat jumlah, kualitas dan waktunya, (2) penyuluhan yang kurang intensif, dan (3) pengembalian kredit dengan tingkat bunga yang rendah (18%)

Namun dibalik kekurangan-kekurangan itu, juga terdapat beberapa manfaat Bimas Gotong Royong antara lain (1) bimas Gotong Royong telah membuktikan bahwa melalui pengusaha-pengusaha swasta nasional, pupuk dan sarana produksi lainnya dapat dikirimkan sampai ke desa bahkan sampai ke sawah petani; (2) cara pemberantasan hama pada tanaman padi melalui penyemprotan dari udara; (3) petani non peserta Bimas Gotong Royong, telah

menyakini manfaat pupuk dan pestisida dalam usaha peningkatan produksi padi (Sri Margono dkk, 2010: 227).

Banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program Bimas Gotong Royong akhirnya mendorong pemerintah untuk memperbaikinya yaitu dengan mengubah Bimas Gotong Royong menjadi Bimas Nasional yang disempurnakan. Program Bimas Nasional yang disempurnakan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penempatan tenaga penyuluh lapangan diperbanyak sehingga setiap kecamatan memilikinya
2. Pelayanan kredit melibatkan aparat bank dalan hal ini BRI dan langsung diberikan kepada petani perorangan
3. Kios-kios pelayanan sarana produksi didirikan untuk setiap wilayah unit desa, dan
4. Memperhatikan pengolahan hasil dan pemasaran

Sasaran Bimas adalah petani/kelompok tani, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai obyek petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subyek petani merupakan pemimpin sekaligus sebagai pelaksana utama dalam usaha taninya. Dengan Bimas, perkembangan usaha tani diarahka pada: (a) praktek berusaha tani yang lebih baik, (b) berusaha tani yang lebih menguntungkan, (c) berkehidupan yang lebih layak dan tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (Sri Margono dkk, 2010: 228-229).

**2. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan pada Pelita II**

Pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pencapaian swasembada pangan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita II pada dasarnya merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada Pelita I. Seperti halnya pada Pelita I, tugas pokok sektor pertanian dalam Pelita II adalah berusaha membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, baik dalam lapangan pekerjaan baru maupun dalam pekerjaan yang sudah dikenal, dan membantu usaha untuk lebih meratakan pembagian pendapatan baik antara golongan dalam masyarakat maupun antara daerah-daerah.

Dalam rangka ini, segala kegiatan pembangunan sektor pertanian diusahakan agar dapat memenuhi fungsinya untuk: (1) meningkatkan kemampuan berproduksi para petani agar dapat turut aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan; (2) memelihara kelangsungan peningkatan produksi pangan, terutama beras, dengan tujuan mencukupi kebutuhan; (3) mengurangi pengangguran di desa baik yang nyata maupun yang tersembunyi; (4) meningkatkan bahan pertanian yang dapat membantu perkembangan industri dalam negeri umtuk mencapai keseimbanagan antara bidang pertanian dan bidang industry; dan (5) meningkatkan pemanfaatan potensi sumber alam yang ada dan menjaga kelestariannya demi kepentingan generasi mendatang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut, pembangunan di bidang pertanian khususnya yang menghasilkan beras, palawija, dan

hortikultura, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi para petani agar mereka semakin mampu memanfaatkan cara-cara berproduksi yang terbaru, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Di samping itu produksi bahan pangan akan ditingkatkan agar bsecepat mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Tambahan pula peningkatan produksi bahan pangan ditujukan juga untuk mengembangkan industri pengolahan pangan. Tujuan lain ialah memperluas lapangan kerja.

Di samping itu dalam usaha meningkatkan kemampuan produksi para petani yang menjadi tujuan adalah meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi pengaruh musim terhadap pendapatannya. Untuk mencapai tujuan itu bimbingan kepada para petani tidak hanya diarahkan kepada poeningkatan kemampuan bercocok tanam satu jenis tanaman, tetapi juga akan diarahkan kepada peningkatan kemampuan memanfaatkan tanah dan air dengan pola bertanam yang lebih intensif. Agar kebijaksanaan di atas dapat dilaksanakan, jumlah penyuluh lapangan berangsur-angsur akan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu pengetahuan mereka masing-masing akan ditingkatkan

Agar dapat mencapai tujuan tersebut kegiatan dalam bidang ini akan didasari oleh kebijakan pokok berikut: (1) meningkatkan produksi padi/beras melalui perluasan intensifikasi dengan panca usaha lengkap di daerah-daerah yang terjamin pengairannya, termasuk daerah irigasi baru dan melalui perluasan intensifikasi padi gogo yang kurang terjamin pengairannya. Di samping itu juga mengadakan ekstensifikasi secara luas dengan pembukaan

tanah baru bersamaan dengan transmigrasi. Dalam usaha ekstensifikasi ini termasuk usaha pembangunan irigasi baru yang dapat menghasilkan sawah baru; (2) meningkatkan produksi palawija dan hortikultura yang dikaitkan dengan usaha meningkatkan kemampuan para petani baik dalam usaha intensifikasi pengusahaan tanaman, maupun dalam intensifikasi penggunaan tanah serta pemanfaatan air pengairan secara maksimal; (3) meningkatkan pengadaan bibit unggul untuk jenis tanaman utama; (4) menyempurnakan system dan perluasan penyediaan kredit bagi para petani, termasuk para penyakap, yaitu penggarap bukan pemilik tanah; (5) menyempurnakan sistem pengadaan dan distribusi, termasuk memperluas penyebaran pengecer sarana produksi, seperti pupuk dan obat pemberantas hama; (6) meningkatkan penyediaan prasarana produksi, baik prasarana phisik maupun prasarana kelembagaan.

Dalam bidang pangan tugas pokok pertanian adalah (1) meningkatkan pendapatan per kapita para petani dengan jalan mempertinggi produktivitas mereka dan (2) mengusahakan peningkatan produksi agar dapat mengimbangi kebutuhan. Seperti halnya dalam Pelita I, peningkatan produksi beras yang sekaligus juga merupakan usaha peningkatan pendapatan para petani secara lebih merata, diusahakan dengan jalan perluasan areal intensifikasi dengan cara panca usaha lengkap perluasan areal terutama akan ditentukan oleh hasil-hasil rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi.

Dalam peningkatan intensifikasi selama Pelita II, peningkatan dan perluasan penggunaan benih varietas unggul akan diberi tempat utama.

Demikianlah maka salah satu kebijaksanaan pokok yang akan ditempuh selama Pelita II adalah meningkatkan pengadaan benih varietas unggul bermutu, yang mempunyai potensi produksi tinggi dan tahan terhadap hama dan penyakit. Dalam usaha mempercepat penyebaran benih bermutu varietas unggul baru kegiatan penyuluhan misalnya dengan cara seperti demonstrasi benih unggul, akan diperluas, khususnya di daerah-daerah yang petaninya belum banyak menggunakan benih varietas unggul.

Pengadaan pupuk merupakan kebijaksanaan yang juga akan menentukan berhasil tidaknya usaha meningkatkan pendapatan petani dan usaha meningkatkan produksi. Penggunaan benih varietas unggul baru tanpa pemupukan tidak akan memberikan tambahan hasil yang berarti. Peningkatan penggunaan benih varietas unggul baru perlu disertai dengan usaha-usaha penyempurnaan organisasi pengamatan serangan hama, beserta peningkatan usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit yang antarra lain memerlukan peningkatan penggunaan obat-obatan yang diperlukan. Ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa varietas tersebut pada umumnya lebih peka terhadap hama dan penyakit dibandingkan dengan varietas padi biasa. Sejalan dengan peningkatan penggunaan obat-obatan pemberantas hama/penyakit, akan diusahakan suatu perundang-undangan mengenai penggunaan obat-obatan tersebut dalam rangka pengamanan terhadap lingkungan hidup maupun terhadap kesehatan manusia dan hewan.

Dalam pelaksanaan intensifikasi dengan panca usaha lengkap akan diusahakan agar para petani dapat menggunakan pupuk secara optimal baik

secara teknis maupun ekonomis. Juga akan diusahakan agar mereka dapat menggunakan obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit sehingga kerusakan panenan yang diakibatkan oleh hama dan penyakit dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya. Disamping penggunaan pupuk buatan, penyuluhan terhadap penggunaan pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau akan ditingkatkan pula (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1974 : 33-39).

Pada sektor palawija, produksi jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan mempunyai peranan sangat penting sebagai sumber pendapatan petani, lebih-lebih di daerah yang tidak mempunyai pengairan yang baik. Untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan para petani, khususnya yang hidup di daerah yang tidak mempunyai persawahan yang baik pengairannya, produksi palawija perlu ditingkatkan. Agar peningkatan produksi palawija secara langsung membantu meningkatkan dan menstabilisasikan pendapatan para petani, maka akan disuhakan penggunaan jagung, shorgum, ubi-ubian dan kacang-kacangan untuk bahan pangan meningkat.

Peningkatan kebutuhan akan palawija diduga juga akan terjadi sebagai akibat kegiatan penggalakan ekspor jagung dan umbi-umbian oleh pemerintah. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa usaha peningkatan produksi palawija, disamping membantu meningkatkan persediaan bahan pangan pengandung karbohidrat serta pengandung lemak dan protein, juga

akan membantu meningkatkan, menstabilisasikan dan meratakan pendapatan petani.

Peningkatan produksi palawija, yang terutama terdiri atas jagung, sorghum, ubi dan kacang-kacangan, akan diusahakan dengan jalan intensifikasi, baik dengan cara bimas (dengan kredit) maupun inmas (tanpa kredit). Dalam intensifikasi palawija, kegiatan penyuluhan, penyediaan pupuk dan pestisida ditingkatkan. Kepada para petani yang ikut program bimas diberikan kredit dengan syarat lunak. Di samping itu penggunaan benih dan bibit varietas unggul diperluas. Untuk menunjang perluasan penggunaan benih unggul, kegiatan penelitian untuk menemukan bibit varietas baru akan diberi prioritas tinggi. Untuk mengimbangi peningkatan produksi yang terjadi, usaha untuk meningkatkan fasilitas pemasaranpalawija juga akan ditingkatkan, untuk rehabilitasi dan pembangunan alat penjemuran, pengolahan, serta penyimpanan disediakan kredit investasi (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1974: 50-51).

**3. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan pada Pelita III**

Pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pencapaian swasembada pangan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita III pada hakekatnya merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan dari segala usaha yang telah dilaksanakan dalam Pelita II. Ini berarti bahwa sasaran yang belum tercapai harus diselesaikan, hasil positif yang telah dicapai perlu dikembangkan terus dan masalah baru yang timbul sebagai akibat dari dinamika pembangunan harus dipecahkan.

Kesemuanya haruslah terlaksana secara terpadu untuk mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi dari petani dan nelayan atau produsen sektor pertanian, yang lebih merata serta seutuhnya menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan menuju swasembada sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui peningkatan penyediaan protein dan vitamin, meningkatkan eksport dan mengurangi impor hasil pertanian, meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian yang dibutuhkan sektor industri dalam rangka usaha menunjang pembangunan industri, meningkatkan dan memanfaatkan pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. Tujuan-tujuan tersebut diarahkan sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan penghasilanya serta untuk memperluas kesempatan kerja secara merata.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas akan dilaksanakan empat usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi (perluasan areal pertanian), diversifikasi dan rehabilitasi. Intensifikasi dimaksudkan peningkatan produktivitas sumber daya alam dari areal hutan, areal pengairan dan areal pertanian, baik tanah sawah, sawah pasang surut, tanah kering, dengan penggunaan teknologi tepat guna termasuk pemanfaatan segala sarana

produksi seperti air, benih unggul, pupuk dan pestisida dengan memperhatikan pula kelestarian sumber daya alam yang bersangkutan dan lingkungan hidup.

Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas areal persawahan dengan pembangunan irigasi baru dan pengembangan daerah rawa, serta perluasan areal pertanian baru dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti padang alang-alang, semak, hutan, perairan payau dan lepas pantai yang belum dimanfaatkan akan diusahakan dengan mengaitkannya dengan pemukinan kembali dan transmigrasi atau pun dengan agro industri yang dapat mendorong masyarakat disekitarnya.

Dengan diversifikasi dimaksudkan keanekaragaman dalam usaha tani maupun keanekaragaman komoditi di suatu wilayah sesuai dengan potensi sumber alam di wilayah bersangkutan dalam memanfaatkan sumber alam tersebut seoptimal mungkin tanpa merusak kelestariaanya dengan memperhatikan pula potensi pasar dari hasil-hasilnya. Diversifikasi juga diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan. Artinya dalam diversifikasi itu, diperhatikan pula pengembangan wilayah, sehingga terjadi keseimbangan antara daerah yang sedang tumbuh.

Rehabilitasi meliputi kegiatan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian baik berupa tanah terlantar maupun yang kritis dan membahayakan kondisi lingkungan serta pemulihan kemampuan berproduksi usaha tani masyarakat di daerah-daerah rawan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Keempat usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi akan merupakan usaha terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Dalam hubungan ini akan ditempuh langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan benar-benar sesuai dengan azas adil dan merata (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1979 : 335-337).

Dalam usaha meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, di samping menjaga kelestariannya, maka pembangunannya diarahkan pada yang sifatnya padat karya. Karena itu pemulihan dan penggunaan teknologi, diarahkan selain untuk menunjang peningkatan produksi, juga diarahkan kepada teknologi yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ketrampilan buruh tani dan petani di pedesaan. Program padat karya tersebut dilaksanakan di daerah Gabus, Pulokulon, Kradenan, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Geyer dan Toroh.

Dengan memperhatikan pengelolaan kelestarian sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin dan perluasan kesempatan kerja, maka usaha-usaha pokok intensifikasi, rehabilitasi, ektensifikasi, diversifikasi yang pada dasarnya sudah dimulai dalam Pelita I dan II akan ditingkatkan dan disempurnakan selama Pelita III. Akan diusahakan agar semua petani, peternak, petani kebon dan nelayan memperoleh kesempatan yang sama untuk melaksanakan intensifikasi di dalam usaha taninya masing-masing. Sesuai dengan yang dilakukan dalam

Pelita II, usaha-usaha intensifikasi akan dilakukan di semua bidang pertanian yakni pertanian tanaman pangan (padi, palawija dan holtikultura), peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1979: 338-339).

**4. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan pada Pelita IV**

Pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pencapaian swasembada pangan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita IV pada dasarnya merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada Pelita III. Dalam Pelita IV, pembangunan pertanian dalam arti luas perlu terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapata petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mendukung pembanguna daerah. Dengan demikian sub sektor pertanian akan makin kuat guna mendukung perkembangan industri dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta mencapai keseimbangan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tujuan pembangunan pertanian dalam Pelita IV di Kabupaten Grobogan dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan usaha peningkatan produksi hasil-hasil pertanian, dalam hal ini termasuk penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan

pemasaran menuju swasembada pangan yang memenuhi kebutuhan gizi dan memperluas dukungan terhadap industri dalam negeri.

2. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, menunjang pembangunan pedesaan dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan yang dimaksud, dalam pelaksanaannya di lapangan diarahkan agar dapat berjalan secara terpadu dan tidak secara sendiri-sendiri, serta berdasarkan pada pendekatan dasar pembangunan pertanian yang isinya sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan usaha tani terpadu, yaitu suatu kegiatan pembinaan terhadap petani dalam melaksanakan bidang usaha tani yang mempunyai satu cabang usaha atau beraneka ragam cabang usaha, dalam memanfaatkan secara optimal segala sumber daya dan dana yang dimiliki, untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani atau produsen lain dalam arti luas;
2. Kebijaksanaan komoditi terpadu, yaitu suatu kegiatan pembinaan terhadap pembinaan produksi berbagai komoditi secara seimbang ditinjau secara vertikal mulai dari produksi, pengolahan sampai pemasaran, maupun secara horizontal dalam menetapkan imbangan antara berbagai komoditi;
3. Kebijaksanaan wilayah terpadu, yaitu suatu kegiatan pembinaan wilayah pertanian sebagai bagian dari wilayah seutuhnya, dengan memperhatikan potensi wilayah secara seimbang, baik ditinjau dari kepentingan sektoral

maupun kepentingan teritorial. Yang dimaksud dengan wilayah adalah wilayah administratif yaitu kecamatan dan desa/kelurahan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1984 : 3-4).

Arah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk meningkatkan harkat dan derajat masyarakat yang berada di wilayah pedesaan sehingga masyarakat pedesaan merasa dan menyadari bahwa pembangunan pertanian adalah untuk mereka.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ditetapkan empat langkah utama atau catur usaha yang merupakan usaha-usaha pokok yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Masing-masing kegiatan yang mencakup dalam intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan dasar Trimatra Pembangunan Pertanian.

Pelaksanaan dari usaha pokok tersebut dalam Pelita IV lebih diarahkan kepada terciptanya azas pemerataan disamping tetap mengusahakan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi dan tetap menjaga kelestariannya. Penyempurnaan kegiatan penyuluhan, pendidikan, penelitian, dan pemilihan teknologi pertanian tepat guna lebih ditingkatkan untuk disebarkan keseluruh masyarakat tani sebagai usaha pendukung laju kegiatan pembangunan pertanian.

Dalam melaksanakan keempat usaha pokok tersebut diusahakan agar terdapat keterpaduan dalam usaha tani, keterpaduan dalam komoditi dan

keterpaduan dalam pengembangan wilayah. Pendekatan dasar yang melandasi seluruh aspek kegiatan pembangunan pertanian, selanjutnya dijabarkan melalui pendekatan terhadap fungsi pokok pembangunan pertanian, yang mencakup pengembangan produksi, pembinaan faktor produksi, pengelolaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup dan energi, pemantapan kelembagaan, perbaikan pemasaran dan perniagaan, penanaman modal, pembiayaan pengembangan wilayah dan kaitan dengan sektor lain Pemerintah (Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1984:5-6)

Adapun kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pembangunan di bidang ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita IV adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Produksi

   Usaha-usaha pengembangan produksi dilaksanakan dengan 4 usaha pokok yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi yang terus dilakukan ditingkatkan.

   a. Intensifikasi

      Intensifikasi adalah usaha meningkatkan produktivitas sumber daya alam (tanah, tumbuh-tumbuhan, sinar matahari, air) dengan meningkatkan penerangan teknologi maju dan tepat guna dan meningkatkan penggunaan sarana produksi (benih dan bibit unggul, pupuk, pakan, obat-obatan pestisida dan lain-lain).

      Usaha yang dilakukan antara lain:

1) Peningkatan pelaksanaan intensifikasi untuk semua komoditi. Penerapan teknologi hasil pengujian untuk seluruh sarana produksi, teknologi bercocok tanam yang lebih baik dan pola pelaksanaan insus dan opsus perlu dipertinggi.
2) Pembentukan sentra-sentra produksi dengan pola gerak menggunakan azas konsentrasi wilayah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan luas panen dari tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, mengembalikan kesuburan lahan yang telah menjadi areal tanah kritis serta perluasan sumber daya alam lainnya.

Usaha yang dilakukan antara lain:

1) Pencermatan pelaksanaan pencetakan sawah dengan penyesuaian prosedur dan petunjuk yang baru.
2) Pengembangan wilayah usaha tani PIR dan usaha tani kolektif.

c. Diversifikasi

Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman dalam usaha tani, baik secara horizontal maupun vertikal.

Diversifikasi secara horizontal yang merupakan imbangan pengembangan antar berbagai komoditi dan wilayah, memasukkan pola tanam pada lahan-lahan kering dan sawah ujung, sawah tadah ujan, sekaligus penanggulangan akibat banjir dan kekeringan dengan mengembangkan sistem surjan.

Sedangkan diversifikasi secara vertikal diartikan pengembangan produksi setelah panen termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan pengolahan hasil dan limbah pertanian sebagai inti dari industrialisasi pertanian.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang kritis serta membahayakan kondisi lingkungan dan pemilihan kemampuan berproduksi usaha tani masyarakat di daerah-daerah rawan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

2. Usaha Penyelamatan dan Pengembangan Produksi

a. Peningkatan usaha perlindungan dengan strategi dasar pengamatan, peramalan pencegahan lebih dini dalam suatu organisasi yang terpadu dalam rangka pola pengendalian hama terpadu.

b. Pasca panen dan penggiatan alsin agar kehilangan hasil diperkecil pada akhir Pelita IV

c. Usaha-usaha peningkatan mutu penyuluh dengan materi-materi penyuluhan tidak hanya materi mengenai padi.

d. Peningkatan penanganan kegiatan hortikultura dan palawija

3. Pembinaan Faktor Produksi

Mengusahakan pencukupan benih dengan jalur benih antar lapang serta kerjasama denga pengusaha dan asosiasi benih. Dalam hal sarana pupuk dan obat-obatan berusaha bersama dengan pihak lain (penyalur) ke arah pelayanan lima tepat (waktu, jenis, jumlah, lokasi dan harga).

Alat dan mesin perlu dikembangkan secara selektif melalui pendekatan wilayah dan teknologi alsin yang bersifat khusus setempat. Alat-alat tersebut baik bagi prapanen, pasca panen bahkan dalam rangka pengendalian hama terpadu.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelestarian kesuburan dari segi pengawetan, penghijauan dalam koordinasi kegiatan penghijauan perlu dipertinggi, selain itu penggunaan pupuk organik dari limbah pertanian juga perlu digiatkan kembali.

5. Perbaikan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan hasil dan pemasaran.

Diarahkan pada penyelamatan hasil panen, peningkatan mutu hasil, peningkatan nilai tambah dengan tujuan memperkecil jumlah surut dan kehilangan hasil dapat ditekan seminimal mungkin.

Perbaikan pembinaan usaha tani dan perusahaan pertanian dalam pola PIR, serta usaha tani kolektif merupakan iklim yang perlu ditumbuhkan guna menjamin pemasaran yang lebih menguntungkan. Disamping pelayanan informasi pasar yang selalu ditingkatkan, maka usaha untuk mendorong terbentuk dan berfungsinya pasar induk perlu dipergiat.

6. Penanaman Modal pada Pertanian Tanaman Pangan

Dengan penetapan komoditi bernilai ekonomi tinggi untuk masing-masing wilayah sesuai dengan agroklimat/identitas wilayah diharapkan dapat menarik investor dalam sub sektor pertanian tanaman pangan.

7. Kaitan dengan sub sektor/sektor lain

Pembangunan pertanian tanaman pangan, bahkan pertanian pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri dan perlu koordinasi dengan sektor lainnya. Untuk itu koordinasi antar sub sektor dan sektor lainnya tersebut terus berusaha untuk ditingkatkan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1984 : 20-26).

**5. Usaha Pencapaian Swasembada Pangan pada Pelita V**

Pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pencapaian swasembada pangan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita V merupakan kelanjutan dan sekaligus peningkatan usaha-usaha pembangunan yang telah dilaksanakan dalam Pelita IV, maka dalam Pelita V pembangunan pertanian terus ditingkatkan dengan tujuan peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasi pertanian, melestarikan produksi dan sumber hayati pertanian serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komoditi bahan baku industri dalam negeri, meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta dalam upaya mengembangkan potensi pertanian.

Selanjutnya guna menunjang pembangunan pertanian maka perlu dilanjutkan usaha untuk memajukan dan mengembangkan teknologi pertanian dengan beberapa petunjuk yang harus diperhatikan yaitu mengupayakan konsepsi wilayah produksi yang lebih teronsentrasi, mengusahakan suatu

sistem produksi yang tidak selalu tergantung pada musim dan cuaca, mengusahakan adanya standar mutu yang jelas serta mengusahakan sistem pertanian ke arah usaha tani yang maju. Demikian pula melalui pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian perlu memperhatikan peningkatan dinamika kelompok, penerapan metode penyuluhan pertanian secara selektif, peningkatan penyelenggaraan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian bagi generasi muda di pedesaan serta peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, keikutsertaan petani merupakan kunci keberhasilan, untuk itu melalui kelompok tani, koperasi dan usaha swasta yang membantu usaha pengembangan pertanian rakyat antara lain melalui Pola Perusahan Inti Rakyat masih terus ditingkatkan, terutama dalam kaitannya dengan proses penanganan sebelum, selama dan sesudah proses produksi.

Prasarana yang sangat penting dalam proses pertanian adalah pengairan. Dalam kaitan ini pembangunan pengairan ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup bagi pertanian, mengamankan areal produksi dari kerusakan akibat banjir serta menunjang penyediaan air bagi masyarakat dan industri.

Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pemanfaatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi yang ada bersamaan pula dengan pembangunan jaringan-jaringan irigasi baru yang diupayakan untuk menunjang pencetakan sawah. Khusus bagi daerah pertanian yang kering serta

tidak terjangkau oleh sistem jaringan irigasi baru diusahakan dengan pengembangan air tanah.

Dalam meningkatkan pemanfaatan jaringan-jaringan irigasi yang ada, akan dilanjutkan jaringan tersier dan kuarter sekaligus meningkatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A Dharma Tirta) agar mampu mengelola pengairan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengaturan air secara efisien (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1989 : 15-18)

Selain usaha tersebut di atas, untuk mempertahankan dan memantapkan swasembada pangan diperlukan peningkatan mutu dan produksi pertanian melalui usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi baik di lahan sawah berpengairan, sawah tadah hujan maupun di lahan kering serta usaha rehabilitasi terutama tanaman keras. Usaha-usaha tersebut perlu didukung dengan pengembangan dan penyediaan paket teknologi, varietas unggul, pengembangan penelitian, pengembangan teknologi pasca panen terutama untuk mengurangi kehilangan hasil dan peningkatan mutu.

Pelaksanaan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi di lahan kering akan selalu dikaitkan dengan usaha-usaha konservasi tanah dan air serta penghijauan kembali. Penanganan masalah pasca panen, pengembangan teknologi makanan dan pengembangan industri pengolahan merupakan usaha yang diperlukan dalam rangka menunjang peningkatan produksi. Untuk itu perlu dikembangkan sentra-sentra produksi sesuai dengan zona industri dan mengarah kepada pengembangan agribisnis baik melalui Perusahan Inti

Rakyat (PIR) maupun perusahaan pembimbing lainnya. Untuk menangani masalah-masalah tersebut juga akan didorong prakarsa dan peran serta masyarakat/petani dan usaha swasta.

Perlindungan tanaman pangan juga makin ditingkatkan dengan meningkatkan mutu tanaman dan memperluas areal pengendalian hama terpadu. Kebijaksanaan ini merupakan kebijaksanaan pengendalian hama/penyakit tanaman yang lebih menekankan cara-cara biologis. Dalam hal ini penggunaan benih yang tahan terhadap hama dan penyakit, pengaturan pola tanam, pergiliran tanaman/varietas serta keserempakan waktu tanam. Untuk dapat mengamati kemungkinan serangan atau eksploitasi hama dan penyakit tanaman secara dini, maka sistem dan sarana kegiatan pemberantasan akan lebih disempurnakan, terrmasuk meningkatkan kemampuan petani baik secara sendiri maupun kelompok dalam memantau dan memberantas hama/ peyakit.

Sesuai dengan kebijaksanaan tersebut di atas, maka langkah-langkah operasional dalam pembangunan di bidang ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada Pelita V adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Bahan Pangan

   Untuk penyediaan bahan pangan akan tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkannya 4 usaha pokok, yaitu diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi.

   a. Usaha Diversifikasi

      Usaha diverfikasi perlu terus ditingkatkan baik di tingkat usaha tani maupun di tingkat wilayah. Dalam pengembangan usaha diversifikasi

perlu memperhatikan aspek-aspek agroekologi dan agroklimatnya serta berorientasi pada permintaan pasar, sehingga komoditi yang dikembangkan di suatu wilayah mengarah pada komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif.

Pada diversifikasi horizontal, produksi palawija dan hortikultura terutama untuk memenuhi industri, sedangkan diversifikasi vertikal terutama dengan peningkatan kegiatan pengolahan lebih diarahkan untuk memberi nilai tambah pada petani.

b. Usaha Intensifikasi

Usaha intensifikasi perlu terus ditingkatkan untuk semua komoditi, dengan tetap mempertahankan usaha pelestarian swasembada beras, mencapai swasembada jagung dan kedelai, baik dengan pola insus maupun opsus. Kaitannya dengan penganekaragaman pangan, maka usaha peningkatan intensifikasi selain komoditi padi, perlu ditujukan pula pada jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, kacang hijau dan ubi jalar.

c. Usaha Ekstensifikasi

Usaha ekstensifikasi perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan pencetakan sawah, peningkatan dan pengembangan usaha tani sistim surjan, peningkatan dan perluasan areal tanam tumpang sari pada areal perkebunan, kehutanan, maupun lahan pertanian daerah atas, serta peningkatan pemanfaatan pakarangan secara terpadu.

d. Usaha Rehabilitasi

Usaha rehabilitasi perlu terus ditingkatkan terutama untuk memperbaiki dan meremajakan produktifitas tanaman pangan serta pemulihan kemampuan berproduksi usaha tani masyarakat.

2. Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan

Untuk memecahkan permasalahan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perlu langkah-langkah antara lain:

a. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan usaha tani dalam pola PIR pangan dan Usaha Tani Kooperatif.
b. Diversifikasi usaha tani, merupakan usaha tani terpadu yaitu salah satu usaha meningkatkan pendapatan yang perlu terus dikembangkan
c. Peningkatan pelayanan informasi pasar sebagai usaha peningkatan efektifitas usaha tani dalam menentukan usaha tani dan meningkatkan pendapatan.
d. Pembinaan keterampilan petani dikembangkan melalui usaha peningkatan peranan kelompok tani dalam merencanakan dan melaksanakan usaha taninya.
e. Lebih memantapkan pengembangan komoditi bernilai ekonomi tinggi untuk masing-masing wilayah sesuai dengan agroklimat/identitas wilayah guna menarik investor.
f. Lebih meningkatkan pemerataan kesempatan kerja melalui pembinaan dan pengembangan perusahaan-perusahaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan seperti:

1) Perusahaan penggilingan padi
2) Perusahaan penggilingan tapioka
3) Perusahaan pengawetan buah-buahan
4) Perusahaan pengawetan sayur-sayuran

3. Pengolahan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

a. Peningkatan pendayagunaan sumber air seefektif dan seefisien mungkin.
b. Menciptakan pola distribusi air dan perbaikan pola tanam sesuai dengan air yang tersedia.
c. Lebih meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber daya alam, konservasi lahan dan air, maupun peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tetap memanfaatkan lahan usaha tani tanaman pangan yang telah ada pengembangan teknologi tepat guna, pengadaan sarana dan fasilitas.
d. Pencermatan daerah baru baru dalam rangka pencetakan sawah, dan usaha pengkajian teknologi pemanfaatan lahan ceblungan, daerah banjir rutin yang terus ditingkatkan.
e. Pengkajian pemanfaatan limbah pertanian sebagai usaha peningkatan kesuburan lahan.
f. Peningkatan perlindungan tanaman dan lingkungan pertanian akan dilaksanakan:

1) Pencermatan terhadap penggunaan pestisida lebih ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan.
2) Penggunaan pestisida tetap memperhatikan keefektifan dan efisien dan keamanan pemakai maupun lingkungan.
3) Peningkatan kegiatan monitoring dan identifikasi penggunaan varietas padi untuk penanggulangan ancaman jasad pengganggu.
4) Pencermatan dan pengaturan pola tanam dan pergiliran varietas yang ditingkatkan untuk pencegahan jasad pengganggu.
5) Lebih meningkatkan peranan brigade dengan pemantapan tenaga dalam kelengkapan sarana pengendalian (alat, pestisida) yang memadai.

4. Pengembangan dan Alih Teknologi

Dalam kaitan masalah tersebut, perlu ditempuh usaha-usaha:

a. Selalu menciptakan hubungan antara Dinas dan penyuluh maupun antar Sub Sektor dalam bentuk kegiatan.
b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian dalam rangka menumbuhkan dinamika kelompok tani untuk mengadopsi teknologi.
c. Menciptakan kegiatan secara terpadu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan agar dapat diterapkan petani sesuai dengan kondisi agroklimat.
d. Pemantapan dan peningkatan penyuluhan di bidang hortikultura.

e. Pengkajian, identifikasi dan inovasi peralatan pra dan pasca panen yang tepat guna.

f. Peningkatan penelitian guna peningkatan mutu dan jumlah produksi.

5. Sarana Produksi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran

a. Meningkatkan penyediaan benih/bibit dengan usaha:

1) Memantapkan pembenihan mulai dari mendatangkan benih sumber (BS), perbanyakan benih di balai-balai benih serta jalinan benih antar lapang (khusus palawija kacang-kacangan) dengan satu perencanaan pola alur benih yang menyeluruh bagi semua komoditi sampai di kecamatan setiap musim/tahun dalam hal macam komoditi, varietas yang dibutuhkan denga pertimbangan pola tanam setempat sesuai jumlah kebutuhan.

2) Penyediaan benih secara berkelanjutan dengan harga terjangkau petani.

3) Perbaikan kualitas komoditi hortikultura.

b. Lebih meningkatkan peranan swasta, antara lain:

1) Meningkatkan peranan penangkar, pedagang dan perusahaan benih mulai dari perencanaan, pengadaan (varietas, waktu, lokasi, jumlah, bila mungkin harga) ke arah 5 tepat sampai dengan pengalokasian penyebarannya dengan mempertimbangkan pola pergiliran agroklimat setempat dan meningkatkan pengawasannya.

2) Lebih mendorong peranan swasta di bidang pengadaan, penyaluran dan pengembangan perbenihan.

c. Penggunaan pupuk dan obat-obatan:

1) Perlu diterapkan di tingkat lapang penggunaan pupuk berimbang seperti kombinasi pupuk nitrogen, fosfat, kalium, serta penggunaan unsur-unsur mikro khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan.
2) Pencermatan penggunaan pupuk sesuai rekomendasi yang dianjurkan, serta lebih memanfaatkan penggunaan pupuk hiaju dan kompos guna pelestarian kesuburan tanah.
3) Pencermatan dan peningkatan penggunaan produk-produk baru zat pengatur tanah.
4) Lebih mendekatkan tersedianya pupuk dan obat-obatan denga tepat jenis, jumlah, tempat, waktu dan harga melalui KUD, pengecer maupun kelompok tani.
5) Peningkatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida secara tertib.
6) Pembinaan yang lebih ditingkatkan terhadap swasta dan koperasi agar petani mendapat kemudahan memperoleh sarana produksi, sarana pengendalian (pestisida dan alat-alat pengendalian).

d. Penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran;

1) Mendayagunakan peralatan pasca panen yang ada dan menyediakan peralatan pasca panen tepat guna untuk mengurangi kehilangan lahan hasil, dan mengurangi kemerosotan mutu hasil.

2) Membina dan mengaktifkan kelompok tani dalam hal pengolahan hasil dan pemasaran, serta mengikutsertakan kelompok tani dalam organisasi koperasi.

3) Melaksanakan kerjasama antara petani dan usaha swasta agar memperpendek rantai pemasaran.

4) Lebih menigkatkan partisipasi dan peranan pengolah hasil, swasta serta KUD dalam penanganan pasca panen.

e. Peralatan dan mesin pertanian

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian secara efektif serta penyediaan dan pengembangan peralatan hasil yang tepat guna.

f. Sarana dan prasarana fisik penunjang

Peningkatan sarana dan prasarana fisik penunjang terutama untuk memperlancar arus sarana produksi dan pemasaran hasil (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1989:45-50).

## B. Dampak Usaha Pencapaian Swasembada Pangan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan

### 1. Perkembangan Peningkatan Produksi

a. Perkembangan peningkatan produksi pada Pelita I

Produksi hasil-hasil pertanian terpenting selama Pelita I menunjukkan peningkatan. Selama tahun 1968 sampai dengan tahun 1971 produksi beras menunjukkan kenaikan yang menggembirakan. Selama masa itu produksi bertambah dengan tingkat kenaikan yang berkisar antara 4,4 % dan 7,2 %

setahun. Untuk laju peningkatan produksi beras rata-rata meningkat 4,4 % selama tahun 1968-1973. Laju peningkatan tersebut jauh melebihi tingkat pertambahan rata-rata selama tahun-tahun sebelumnya. Lebih penting dari itu, laju peningkatan selama tahun 1968-1973 lebih tinggi dari tingkat pertambahan rata-rata penduduk. Dengan perkataan lain produksi per kapita beras pada tahun 1973 ini lebih tinggi dari produksi per kapita tahun 1968.

Peningkatan produksi pada Pelita I merupakan hasil usaha perluasan areal panen padi dan peningkatan hasil per hektar. Peningkatan ini antara lain dimungkinkan oleh hasil-hasil yang dicapai dalam Rehabilitasi dan pembangunan pengairan selama Pelita I. Selanjutnya pada periode yang sama produksi rata-rata per hektar meningkat 17,8 %. Peningkatan produktivitas ini sudah tentu mempunyai pengaruh yang baik atas penghasilan petani.

Kenaikan produksi padi ini terutama disebabkan oleh perluasan kegiatan intensifikasi Bimas dan Inmas. Ini terlihat dari perkembangan hasil per hektar dari areal sawah yang tercakup dalam kegiatan Panca Usaha Lengkap Bimas dan Inmas. Luas areal kegiatan-kegiatan intensifikasi inipun setiap tahun juga meningkat. Jumlah kecamatan dan jumlah desa yang ikut serta dalam kegiatan Panca Usaha Lengkap Bimas dan Inmas dalam Pelita I juga berkembang dengan pesat (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1974 : 25).

Peningkatan hasil produksi per hektar yang telah dikemukakan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya perkembangan kemampuan, kesediaan dan kesempatan para petani yang bersangkutan untuk menggunakan

pupuk dan obat-obatan. Perkembangan ini erat sekali hubungannya dengan jumlah penyuluh-penyuluh spesialis dan penyuluh-penyuluh lapangan yang tersebar di daerah-daerah. Selanjutnya perkembangan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan pupuk dan obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit dipengaruhi oleh perkembangan jumlah wilayah unit desa dengan kios-kios pengecer sarana produksinya, dan oleh perkembangan jumlah Bank Rakyat Indonesia unit desa dan jumlah badan usaha unit desa (Wawancara, Ir. Hidayat : Juli 2012).

Peningkatan produksi beras pada Pelita I ini tidak diikuti peningkatan produksi palawija seperti jagung dan umbi-umbian yang mengalami sedikit penurunan. Perkiraan produksi tahun 1973 berada di bawah produksi tahun 1968. Penurunan produksi palawija tersebut terutama disebabkan karena penurunan luas panenan. Ini disebabkan oleh karena petani memperoleh kesempatan yang semakin besar untuk bertanam padi, dan perkembangan harga padi lebih menguntungkan dari perkembangan harga palawija (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1974 : 25).

b. Perkembangan peningkatan produksi pada Pelita II

Selama Pelita II produksi jasil-hasil pertanian terpenting seperti beras pada umumnya meningkat. Namun ada juga komoditi yang produksinya menurun seperti jagung, ubi kayu dan kedelai.

Kegiatan Bimas dan Inmas dalam usaha meningkatkan produksi padi selama 4 tahun pertama Pelita II mempunyai peranan penting. Luas panen intensifikasi yang hanya mencapai 45,5% dari luas total areal panen

menghasilkan padi sebesar 56,6% dari seluruh produksi. Ini disebabkan karena hasil rata-rata dari usaha intensifikasi mencapai 22,8 kwintal beras per hektar, sedangkan hasil rata-rata dari usaha-usaha non intensifikasi hanya mencapai 14,5 kwintal beras per hektar (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1979: 318).

Sebagai akibat dari kegiatan intensifikasi, hasil rata-rata per hektar beras selama tahun terakhir telah meningkat 3,8% per tahun. Banyak faktor yang memungkinkan peningkatan hasil rata-rata per hektar ini, terutama bertambah baiknya prasarana pengairan dan semakin meningkatnya daya guna serta hasil guna kegiatan penyuluhan. Di samping itu meningkatnya penggunaan pupuk dan pestisida, meningkatnya hasil guna dan daya guna lembaga-lembaga perkreditan, lembaga-lembaga pemasaran sarana produksi, aparatur pemerintahan, baik di tingkat kecamatan maupun di pedesaan, dan meluasnya peranan BUUD/KUD, semuanya turut mendorong terjadinya peningkatan tersebut. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah membaiknya struktur harga padi dan gabah pada tingkat petani, sebagai hasil dari kebijaksanaan harga dasar yang ditempuh selama ini.

Terjadinya musim kemarau yang kering dan panjang, adanya bencana banjir pada musim hujan dan serangan hama dan penyakit terutama eksplosi hama wereng dan virus padi telah menghambat perkembangan produksi selama Pelita II. Hal ini telah mengakibatkan laju pekembangan produksi beras tidak setinggi yang diharapkan semula, bahkan lebih rendah dari laju perkembangan selama Pelita I (Wawancara, Ir. Hidayat : Juli 2012).

Selama Pelita II produksi padi Bimas dan Inmas mengalami pasang surut, karena keadaan alam yang kurang menguntungkan (bencana alam banjir), hama (wereng, tikus, dsb), sehingga tidak terlalu terdapat peningkatan produksi padi setiap tahunnya, padi mencapai 137.347 ton dalam areal seluas 79.299 Ha atau rata-rata 19,54 kwintal/Ha. Pada tahun 1975/1976 produksi padi menjadi 145.909 ton dalam areal seluas 62.919 Ha atau rata-rata 27,32 kwintal/Ha. Sedangkan dalam 1977/ 1978 produksi mencapai sebesar 186.571 Ha atau rata-rata 29,30 kwintal/Ha.

Produksi palawija selama Pelita II pada umumnya tidak menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Produksi jagung selama lima tahun tersebut menurun rata-rata 3,9 % per tahun. Sedangkan produksi ubi kayu setiap tahun hanya meningkat rata-rata 2,4 % dan ubi jalar 0,7 %. Kurang meningkatnya produksi palawija selama Pelita II terutama disebabkan oleh menurunnya luas panen. Di samping itu keadaan harga pada tingkat petani kurang mendorong gairah peningkatan produksi. Walaupun demikian hasil rata-rata per hektar produksi palawija selama Pelita II menunjukkan kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya program intensifikasi palawija yang dilaksanakan sejak tahun 1973 (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1979: 319).

c. Perkembangan peningkatan produksi pada Pelita III

Hasil yang dicapai selama Pelita III dari usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan, baik berupa peningkatan produksi, penyediaan pangan karbohidrat/ kalori, protein maupun vitamin-vitamin lainnya.

Secara garis besar perkembangan produksi yang meliputi padi dan palawija sebagai berikut:

1) Perkembangan produksi padi

Dalam Pelita III produksi padi sawah meningkat dengan pesat yaitu sebesar 12,28 % rata-rata per tahun. Hal ini disebabkan karena:

a) Berhasilnya intensifikasi khusus (insus) sehingga dapat meningkatkan produksi rata-rata per hektar
b) Semakin berhasilnya penyuluhan sehingga petani mau menggunakan teknologi baru, yang diikuti pula siapnya aparat yang menangani saprodi
c) Serangan hama, terutama hama wereng dan tikus yang merupakan hama yang membahayakan telah dapat diatasi.

2) Perkembangan produksi palawija

a) Produksi jagung

Secara umum produksi jagung telah meningkat 34,91 % dalam Pelita III. Namun produksi jagung fluktuasinya masih sangat besar, karena tergantung dari areal tanam/ panen. Jagung banyak ditanam pada lahan kering/ tegalan dan sawah pada awal musim penghujan atau awal musim kemarau/ akhir musim penghujan.

b) Produksi kedelai

Sama halnya komoditi jagung, kedelai pun merupakan komoditi palawija yang diprioritaskan untuk pengembangannya. Produksi kedelai selama Pelita III meningkat 6,91 % per tahun. Fluktuasi

produksi kedelai sangat besar tergantung dari keadaan musim, sama seperti produksi jagung.

c) Produksi ubi-ubian

Selama Pelita III komoditi ubi-ubian (ketela pohon, ketela rambat) menunjukkan kenaikan yang nyata, dimana ketela pohon meningkat 3,25 % rata-rata per tahun dan ketela rambat 10,76 % rata-rata per tahun. Untuk ketela rambat ada kecenderungan areal tanam/ panen semakin menurun. Hal ini disebabkan karena petani mengalihkan usahanya ke jenis komoditi yang lebih menguntungkan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1984 : 12).

d. Perkembangan peningkatan produksi pada Pelita IV

Usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan selama Pelita IV menunjukkan hasil yang cukup baik, hanya beberapa komoditi terutama komoditi palawija mengalami kenaikan dan penurunan produksi.

Perkembangan luas panen dan produksi padi dan palawija di kabupaten Grobogan selama Pelita IV mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif tidak begitu besar. Luas areal padi rata-rata mengalami kenaikan 1,78 % pertahun sedangkan palawija yang mengalami kenaikan luas areal adalah kedelai 7,97%, kacang tanah 3,64 %, sorghum 11,94 %, dan jagung 3,87 %, sedangkan untuk palawija yang lain mengalami penurunan luas areal dengan rata-rata penurunan kacang hijau 4,88 %, ketela rambat 3,56 %, dan ketela pohon 0,36 %.

Perkembangan produksi padi dan palawija selama PELITA IV ternyata juga mengalami kenaikan dan penurunan. Produksi padi rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,90% pertahun, sedangkan palawija yang mengalami kenaikan produksi adalah ketela pohon 9,52% pertahun, kacang hijau 1,45%, kedelai 17,17%, jagung 10,13% dan sorghum 18,85%. Penurunan produksi terjadi pada ketela rambat sebesar -4,17% dan kacang tanah -0,99% (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1989 : 6)

e. Perkembangan peningkatan produksi pada Pelita V

Usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan selama Pelita V menunjukkan hasil yang cukup baik, sebagian besar komoditi mengalami kenaikan. Hasil yang dicapai selama Pelita V dari usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan, terutama berupa peningkatan produksi. Produksi padi rata-rata mengalami kenaikan sebesar 3,75% pertahun, sedangkan palawija yang mengalami kenaikan produksi adalah jagung 6,15% pertahun, ketela pohon 5,38%, sorghum 12,40 % dan kedelai 10,21% (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1993 : 14)

**2. Peningkatan Pendapatan Petani dan Perluasan Lapangan Kerja**

Dengan adanya program Pembangunan Lima Tahun, produksi maupun hasil per hektar dalam sektor pertanian pada umumnya telah meningkat. Peningkatan produksi pada umumnya dicapai dengan intensifikasi.

Khususnya dalam peningkatan produksi pangan kegiatan intensifikasi itu disertai dengan penyediaan faktor produksi pada tingkat harga yang murah dan disertai pula dengan jaminan harga dasar untuk padi yang dihasilkan.

Dengan demikian kesempatan untuk meningkatkan pendapatan petani menjadi semakin luas. Peningkatan pendapatan golongan petani merupakan sumbangan yang sangat berarti kepada usaha lebih meratakan pendapatan antar golongan.

Kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi memerlukan jumlah tenaga yang lebih besar. Dengan demikian lapangan kerja bagi petani-petani buruh menjadi lebih luas pula. Selanjutnya penggunaan pupuk dan pestisida juga meningkatkan penghasilan para pedagang pupuk dan juga meningkatkan penggunaan jasa pengangkutan. Peningkatan produksi juga meningkatkan kebutuhan akan jasa pengolahan serta pemasaran, inipun semuanya berakibat perluasan kesempatan kerja. Usaha perbaikan pengairan, perbaikan jalan, penambahan lembaga perkreditan, dan juga peningkatan kegiatan penyuluhan semuanya merupakan kegiatan yang mengakibatkan peningkatan dalam kesempatan kerja di daerah pedesaan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1984 : 15)

Peningkatan pendapatan petani serta perluasan kesempatan kerja berlangsung seiring dengan perkembangan peningkatan produksi pertanian yang diusahakan lewat program intensifikasi, perluasan areal, rehabilitasi dan peremajaan tanaman tahunan, penerapan sistem perkebunan inti dalam perluasan-perluasan pertanian, usaha pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, serta usaha-usaha penghijauan dan reboisasi.

Usaha-usaha peningkatan produksi pangan telah banyak timbul peluang untuk peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.

Penerapan Panca Usaha Pertanian dalam bentuk penggunaan benih unggul, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, cara bercocok tanam yang maju dan pengairan jelas-jelas telah membantu usaha-usaha peningkatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan.

Demikian juga usaha-usaha perluasan areal irigasi dan usaha-usaha diversifikasi. Usaha-usaha lain yang secara tidak langsung menunjang kegiatan peningkatan produksi, seperti perbaikan jalan, transportasi, perkreditan, penyuluhan dan lain-lain, juga merupakan kegiatan yang menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1989 : 12)

Dengan adanya pembangunan pada pertanian tanaman pangan, pendapatan petani dan perluasan lapangan kerja terbuka sangat lebar. Banyak kesempatan kerja baru yang menyangkut aspek produksi itu sendiri sampai pada aspek angkutan, pemasaran dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi memerlukan jumlah tenaga yang lebih besar. Dengan demikian lapangan kerja bagi petani-petani buruh menjadi lebih luas pula. Selanjutnya penggunaan pupuk dan pestisida juga meningkatkan penghasilan para pedagang pupuk (Wawancara, A. Zulfa Kamal, S.P : Juli 2012).

Peningkatan produksi juga meningkatkan kebutuhan akan jasa pengolahan serta pemasaran, inipun semuanya berakibat perluasan kesempatan kerja. Demikian juga usaha-usaha perluasan areal irigasi dan

usaha-usaha diversifikasi. Usaha-usaha lain yang secara tidak langsung menunjang kegiatan peningkatan produksi, seperti perbaikan jalan, transportasi, perkreditan, penyuluhan dan lain-lain, juga merupakan kegiatan yang menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Wawancara, A. Zulfa Kamal, S.P : Juli 2012).

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Kondisi perekonomian di Kabupaten Grobogan pada masa awal kemerdekaan hingga memasuki awal orde baru sangat memprihatinkan. Masalah yang sangat mendesak untuk segera ditangani adalah keadaan ekonomi rakyat, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar mata pencahariannya dibidang pertanian. Dengan demikian penanganan terhadap keadaan lahan pertanian dan sarana penunjangnya perlu segera dilaksanakan.

Kondisi tersebut di atas membuat pemerintah membuat landasan-landasan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam pola umum program pembangunan jangka panjang yang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat banyak dan yang sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap yang berikutnya.

Pelaksanaan Repelita ini dititikberatkan pada bidang pertanian melalui usaha-usaha dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Pilihan pada sektor pertanian ini didasarkan pada strategi pembangunan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan dibidang pertanian. Serentak dengan majunya sektor pertanian dengan tercapainya swasembada pangan, maka sektor-sektor lain turut pula terangsang pembangunannya.

Peningkatan produksi pertanian menarik sektor industri yang menghasilkan bahan-bahan baku yang diperlukan oleh sektor pertanian seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya.

Dengan adanya pembangunan pertanian menuju tercapainya swasembada pangan, pendapatan petani dan perluasan lapangan kerja terbuka sangat lebar seiring dengan perkembangan peningkatan produksi pertanian yang diusahakan lewat program intensifikasi, perluasan areal, rehabilitasi, serta usaha pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi memerlukan jumlah tenaga yang lebih besar. Dengan demikian lapangan kerja bagi petani-petani buruh menjadi lebih luas pula. Selanjutnya penggunaan pupuk dan pestisida juga meningkatkan penghasilan para pedagang pupuk.

Peningkatan produksi juga meningkatkan kebutuhan jasa pengolahan serta pemasaran yang semuanya berakibat perluasan kesempatan kerja. Demikian juga usaha-usaha perluasan areal irigasi dan usaha-usaha diversifikasi. Usaha-usaha lain yang secara tidak langsung menunjang kegiatan peningkatan produksi, seperti perbaikan jalan, transportasi, perkreditan, penyuluhan dan lain-lain, juga merupakan kegiatan yang menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan Repelita melalui usaha pencapaian swasembada pangan sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten grobogan.

## B. Saran

Usaha pencapaian swasembada pangan yang dilaksanakan pemerintah tahun 1968-1992 harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi karena program pemerintah tersebut sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten grobogan.

Peran Dinas Pertanian sebagai instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini juga harus lebih ditingkatkan lagi, diantaranya dengan memperbanyak penyuluh lapangan, penyediaan bibit unggul, serta penyediaan pupuk dan insektisida agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik sehingga kemiskinan di Kabupaten Grobogan semakin berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Grasindo

Andre, Bayo. 1996. *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberti

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 1992. *Kabupaten Grobogan dalam Angka*. Grobogan: BPS Kabupaten Grobogan

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga

Darmawan. 1998. *Kemiskinan Global*. Yogyakarta: Resist Book

Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press

Nasikun. 1996. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga* . Yogyakarta: Tiara Wacana

Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan. 1990. *Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke IV Kabupaten Grobogan.* Grobogan: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan. 1995. *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan.* Grobogan: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.1974. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama Daerah 1969/1970 – 1973/1974 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.* Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.1979. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua Daerah 1974/1975 – 1979/1980 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.* Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.1984. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Daerah 1979/1980 – 1983/1984 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.* Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.1989. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1983/1984 – 1989/1990 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.* Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.1993. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah 1989/1990 – 1993/1994 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.* Semarang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press

Rosyidi, Suherman. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Jaya

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sri Margono, dkk. 2010. *Sejarah Pangan di Indonesia: Strategi dan Politik Pangan dari Masa Kolonial sampai Reformasi*. Jakarta: CV. Multi Prima

Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Tambunan, Tulus T. H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

*http://www.bappenas.go.id*

*http://www. bersamatoba.com*

*http://www.grobogankab.go.id*

# INSTRUMENT PENELITIAN SKRIPSI

1. Berikan penjelasan singkat tentang kondisi perekonomian Kabupaten Kabupaten Grobogan pada tahun 1968-1992.
2. Bagaimana langkah dinas pertanian dalam rangka ikut menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Grobogan?
3. Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan dinas pertanian untuk mensukseskan program swasembada pangan di Kabupaten Grobogan?
4. Kendala apa sajakah yang dilakukan dinas pertanian untuk mensukseskan program swasembada pangan di Kabupaten Grobogan?
5. Bagaimanakah dampak dari usaha pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Grobogan?
6. Bagaimana program kerja swasembada pangan kabupaten Grobogan?
7. Bagaimana pelaksanaan program kerja swasembada pangan di kabupaten Grobogan?
8. Bagaimana dampak pelaksanaan program kerja swasembada pangan terhadap penanggulangan kemiskinan di kabupaten Grobogan?

## SUMBER INFORMAN

1. Nama : Ir. Edhie Sudarwanto, MM

   Umur : 55 Tahun

   Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. grobogan

2. Nama : A. Zulfa Kamal, S.P

   Umur : 50 Tahun

   Jabatan : Kabid Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan

3. Nama : Ir. Hidayat

   Umur : 52 Tahun

   Jabatan : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Grobogan

**DOKUMENTASI**

Foto rumah warga miskin

Foto rumah warga miskin

Foto rumah warga yang sudah mulai berkembang

Foto rumah warga yang sudah mulai berkembang